

**POLA MIGRASI SIRKULER (STUDI KASUS PADA PEKERJA INFORMAL
DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR)**

**Oleh:
Andi Wahyu Rahmatullah
Idham Irwansyah**

**Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar**

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang terjadi. Pendekatan yang dimaksud untuk mengetahui tentang migrasi sirkuler (ulang-alik) orang daerah/pekerja informal di Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alasan bermigrasi orang dari desa ke kota karena didorong oleh berbagai alasan, yakni; (1) prospek kota lebih menjanjikan dari pada di daerah asal hal inilah yang membuat orang menuju kota demi meningkatkan taraf hidup; (2) fasilitas kota lebih banyak atau lebih baik dari pada di desa; (3) jika berada atau bekerja di daerah asal pendapatan sangat kurang; (4) desakan kebutuhan, kebutuhan yang semakin meningkat membuat orang daerah harus meninggalkan daerah asalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Alasan memilih Makassar menjadi pekerja informal nampaknya memiliki motivasi tersendiri, hal ini terjadi karena dengan adanya prospek perkotaan sehingga pertimbangan jarak para migran merupakan hal yang sudah biasa dilalui, terbukti dari banyaknya provesi yang pernah digeluti para pekerja informal ini sebelum mereka melakoni provesinya saat ini. Pola migrasi sirkuler pekerja informal di Makassar, mereka yang bekerja di kota umumnya bisa pulang ke daerahnya kapan saja, atau tergantung dari mobilitas mereka, adapun tujuan kepulangan mereka karena keluarga.

Kata Kunci: Migrasi, Informal.

PENDAHULUAN

Migrasi merupakan gerak horizontal untuk berpindah tempat tinggal dan pindahnya tidak terlalu dekat, melainkan melintasi batas administrasi pindah ke unit administrasi lain misalnya kelurahan, kabupaten, kota atau negara. Dengan kata lain, migrasi

merupakan perpindahan penduduk dari suatu unik geografis ke unit geografis lainnya (Hartomo, 2008: 19). Fenomena migrasi secara umum diasumsikan sebagai suatu perpindahan penduduk berlatar belakang sosial ekonomi.

Masalah pemenuhan kebutuhan hidup sudah menjadi

persoalan yang melanda berbagai kalangan masyarakat dan telah menjelma menjadi suatu permasalahan sosial yang memaksa suatu individu, kelompok, untuk mengatasi berbagai masalah-masalah pokok suatu individu atau kelompok itu sendiri.

Oleh karena itu, sudah menjadi alasan umum ketika seseorang yang bermigrasi, jika ditanya mengenai tujuan berpindah/bermigrasi ujung-ujungnya adalah ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu alasan seseorang bermigrasi guna meningkatkan taraf hidup (bermobilitas). Menurut Everett s.Lee, (Hartomo, 2008: 22). keputusan seseorang dalam bermigrasi antara lain: 1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, 2) Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, 3) Faktor-faktor rintangan dan 4) Faktor pribadi.

Sudah menjadi pemahaman umum bagi banyak orang diberbagai pelosok negeri ini akan harapan-harapan hidup yang lebih baik di kota dengan infrastuktur yang lengkap. Menjanjikan banyak lapangan pekerjaan yang sangat cocok untuk meningkatkan ekonomi. Selain itu, Faktor yang terdapat di

daerah asal membuat sebahagian besar calon migran berpindah karena dengan berpindah dapat merubah pola hidup mereka, dengan pertimbangan bahwa daerah tujuan merupakan daerah potensial, mengingat daerah asal terdapat banyak kekurangan antara lain: (erosi tanah, banjir, kekeringan, guncangan iklim, pertentangan sosial, politik).

Adapun faktor yang terdapat di daerah tujuan menjadi daya tarik para migran karena daerah tujuan terdapat banyak keunggulan antara lain: fasilitas yang lebih baik, kondisi sosial ekonomi lebih memadai, (menurut migran). Terjadinya migrasi juga dipengaruhi oleh faktor pribadi, adanya dorongan dari lingkungan sekitar baik itu teman, kerabat, keluarga sehingga mempengaruhi diri pribadi individu untuk merantau/migrasi.

Fenomena migrasi dapat terjadi diberbagai negara khususnya di indonesia terutama di daerah Sulawesi Selatan, (Makassar). Makassar merupakan salah satu daerah ekonomi skala nasional/metropolitan sehingga menjadi daya tarik orang daerah untuk datang ke Makassar. Pemusatan Makassar sebagai

sektor ekonomi berpengaruh terhadap lahirnya berbagai situasi sosial yakni, Makassar sebagai pusat bertemunya berbagai ciri latar belakang budaya. Dengan bertemunya banyak budaya melahirkan berbagai macam interaksi sosial dalam suatu daerah dan berdampak pada timbulnya gejolak dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri, fenomena migrasi telah menjadi suatu budaya yang mendorong individu untuk bergerak, akibatnya ; terjadilah kepadatan penduduk pada pusat suatu daerah. Dalam hal ini keputusan seorang meninggalkan desa menuju kota dikarenakan juga oleh budaya turun-temurun orang-orang tua pada umumnya yang berhasil dalam perantauan. Sebagai akibat dari budaya tersebut menjadikan seseorang atau kelompok manusia melakukan perpindahan meskipun tanpa adanya modal (*skill*).

Dengan kata lain, kecenderungan masyarakat melakukan migrasi, “dalam penelitian ini adalah migrasi sirkuler,” dikarenakan motif ekonomi, dimana para pelaku migrasi sirkuler

bermobilisasi dengan mencari peruntungan di sdaerah tujuan lalu pulang pada hari itu juga atau pulang dalam waktu kurang dari enam bulan. Para pelaku sirkuler pada umumnya melakukan mobilisasi secara independen dimana waktu yang dimiliki para pelaku migran sirkuler tidaklah terbatas, dalam hal ini seorang migran dapat kembali ke daerah asal sesuai dengan keinginannya dikarenakan pekerjaan nonformal tidaklah terikat pada instansi tertentu yang mengharuskan seseorang berada pada kontrak kerja.

Kehidupan para pekerja migran informal ini merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti, karena mobilitas pekerja informal kota Makassar sebahagian besar berada di kecamatan manggala merupakan lokasi strategis yaitu dimana peneliti melihat kepadatan penduduk di daerah tersebut sangat berpotensi bagi para pelaku migrasi sirkuler dalam mencari peruntungan.

Pelaku migrasi sirkuler pada umumnya yang berada di kecamatan manggala adalah bekerja sebagai pedagang kaki lima, pedagang asongan, dimana para pekerja tersebut banyak terdapat

dipinggir jalan yang berada di sekitar kecamatan manggala.

Dalam hal ini mobilitas pekerja informal dalam konteks migrasi sirkuler secara teori dipertegas oleh Ida Bagoes Mantra bahwa migrasi sirkuler dapat dibagi menjadi dua yaitu, *ulang=alok (commuting)* dan *mondok*, ulang alok adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga.

Secara operasional bentuk migrasi sirkuler diukur berdasarkan konsep ruang dan waktu misalkan migrasi ulang alok, konsep waktunya diukur kurang lebih enam jam meninggalkan daerah asal dan kembali pada hari yang sama, sedangkan *mondok* diukur berdasarkan lamanya meninggalkan daerah asal lebih dari satu hari tetapi kurang dari enam bulan.

Berdasarkan teori Mantra di atas maka peneliti berasumsi jika pola migrasi sirkuler pekerja informal sebahagian besar adalah pekerja yang melakukan migrasi sirkuler *mondok*. Dimana pelaku migrasi *mondok* tersebut bekerja di daerah tujuan beberapa waktu, lalu kembali ke daerah asal dengan membawa hasil bekerja dari kota untuk

keluarga di desa kemudian kembali lagi ke kota untuk bekerja. Maka dari itu penulisan karya tulis ini penulis mencoba mengkaji "Pola Migrasi Sirkuler (Studi Kasus Pada Pekerja Informal Di Kecamatan Manggala Kota Makassar)"

KERANGKA KONSEPTUAL

Migrasi adalah suatu gerak horizontal untuk berpindah tempat tinggal yang pindahnya tidak terlalu dekat, melainkan melintasi batas administrasi, pindah ke unit administrasi lain, misalnya kelurahan, kabupaten, kota atau negara. Dengan kata lain migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu unit geografis ke unit geografis lainnya. Unit geografis dapat berarti suatu daerah administrative. Migrasi dapat pula diartikan perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan, dengan didasarkan perbandingan untung rugi yang berkaitan dengan kedua daerah tersebut (Hartomo, 2008: 19).

Menurut Ross Steele (dalam Hartomo, 2009: 19) menyatakan bahwa migrasi meliputi perpindahan ke rumah sebelah yang jaraknya beberapa meter dari rumah lama, tetapi juga mencakup

perpindahan ke negara lain yang jaraknya beribu-ribu kilo meter, selanjutnya PBB mengatakan bahwa migrasi adalah suatu perpindahan tempat tinggal dari suatu unit administratif ke unit administratif lainnya.

Adapun pengertian migrasi adalah suatu perpindahan seseorang melewati batas daerah tertentu antara lain negara, provinsi, kabupaten/kota atau dapat juga dikatakan bahwa migrasi merupakan perubahan tempat tinggal dari yang biasanya.

Konsep migrasi menurut paparan para ahli diatas mengandung pengertian sebagai perubahan tempat tinggal secara permanen, tidak memberikan batasan pada jarak maupun sifat kepindahan tersebut.

Menurut Ravenstein (Hartomo, 2008:22) fenomena migrasi terediri dari beberapa hukum-hukum antara lain:

- a) Semakin jauh jarak, semakin berkurang volume migran. Teori ini kemudian dikenal dengan nama "distancedecay theory".
- b) Setiap aras migran yang benar, akan menimbulkan arus balik sebagai gantinya.

- c) Adanya perbedaan desa dengan kota-kota akan mengakibatkan timbulnya migrasi.
- d) Wanita cenderung bermigrasi kedaerah-daerah yang dekat letaknya.
- e) Kemajuan teknologi akan mengakibatkan intensitas migrasi.
- f) Motif utama migrasi adalah ekonomi

Berkenaan dengan teori migrasi diatas menurut Lee (1969) yang dikutip oleh Narwoko (2007:329) menggambarkan bahwa migrasi sebagai perpindahan yang permanen atau semi permanen, sedangkan Magalam (1968) yang masih dikutip oleh Narwoko (2007:329) menyebutkan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu kelompok yang disebut kaum migran, dari suatu lokasi kelokasi lainnya. Migrasi diasumsikan sebagai 'permanen' seorang migran yang nampaknya permanen misalnya, seorang yang ketika datang menyatakan akan menjadi penduduk tetap Australia mungkin hanya tinggal selama beberapa waktu ditempat tujuan yang telah dipilihnya. Perserikatan

bangsa-bangsa (United Nation, 1973) mengartikan seorang migran jangka sebagai orang yang bermaksud tinggal lebih dari 12 bulan, tetapi tentu saja belum tentu masing-masing migran tetap melaksanakan niatnya semula.

Secara sosiologis mereka yang berpindah sangatlah berbeda dengan mereka yang tidak berpindah (Narwoko, 2007: 330). Oleh karena itu dapat dibuat suatu generalisasi mengenai suatu proses migrasi dan suatu sifat umum dari suatu perpindahan penduduk, yakni bahwa migrasi bersifat selektif. Sementara beberapa bukti yang ada dapat dibuat kesimpulan sementara berikut ini: (1) orang muda lebih *mobile* dari pada orang tua; (2) dalam kalangan orang tua, orang yang tidak kawin, orang yang anggota keluarganya hanya satu orang saja, orang yang berstatus ekonomi rendah, penyewa rumah, dan orang yang pindah berulang kali lebih cenderung berpindah tempat (faktor-faktor ini mempunyai hubungan sangat erat); (3) orang muda jauh lebih besar kemungkinan merencanakan dan ingin berpindah daripada orang tua, dan lebih besar kemungkinan melaksanakan rencana mobilitasnya; (4) faktor

perumahan dan ekonomi menghambat sejumlah besar orang tua yang ingin berpindah lagi; (5) dikalangan orang muda, pembentukan karier, mobilitas karier, perkawinan, pembentukan keluarga, dan perluasan keluarga secara jelas membedakan mobilitas tempat tinggal.

Kemudian menurut Brinley Thomas, (Mochtar Naim, 2013: 5) migrasi dipandang sebagai gerakan perpindahan termasuk perubahan tempat tinggal tetap dari satu negeri ke negeri lain yang terjadi disebabkan kemauan sendiri dari yang bersangkutan, baik secara perorangan maupun kelompok.

Mobilitas penduduk dibedakan menjadi dua (Ida Bagoes, 2007: 172-173) yaitu pertama mobilitas penduduk vertikal, yang sering disebut perpindahan status, misalnya, perpindahan status pekerjaan, dimana seseorang yang semula bekerja dalam sektor pertanian sekarang bekerja dalam sektor non pertanian. Kedua, mobilitas penduduk horizontal, yaitu mobilitas penduduk geografis yang merupakan gerak (*movement*) penduduk yang melewati batas wilayah menuju wilayah lain dalam periode tertentu.

Selanjutnya Ida Bagoes (2007: 172-173) menjelaskan bila dilihat ada tidaknya niatan untuk menetap di daerah tujuan, mobilitas penduduk dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen atau migrasi; dan mobilitas penduduk non permanen. Menurut Ida Bagoes (2007) migrasi adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju kewilayah tujuan dengan niat menetap. Sebaliknya mobilitas penduduk non permanen adalah gerak penduduk dari satu wilayah kewilayah lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan.

Sedangkan menurut Steele yang dikutip oleh Bagoes (2007: 173), apabila seseorang menuju ke daerah lain dan sejak awal sudah bermaksud tidak menetap di daerah tujuan, orang tersebut digolongkan sebagai pelaku mobilitas non permanen walaupun bertempat tinggal di daerah tujuan dalam waktu yang lama.

Selanjutnya menurut Ida Bagoes (2007: 173), gerak penduduk non permanen (*circulation*) dibagi menjadi dua, yakni ulang-alik ((jawa= ngelaju) atau *communiting* dalam inggris) dan mondok atau menginap di daerah

tujuan. Mobilitas ulang alik adalah gerak penduduk di daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dengan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Sedangkan mobilitas penduduk mondok merupakan gerak penduduk meninggalkan daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu lebih dari satu hari namun kurang dari enam bulan.

Mobilitas sosial berkaitan dengan perpindahan atau pergerakan suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya; mobilitas kerja dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya; mobilitas teritorial dari daerah ke kota, dari kota ke desa, atau di daerah desa dan kota itu sendiri. Terjadinya peristiwa mobilitas sosial disebabkan oleh penduduk kota yang heterogen, terkonsentrasinya lembaga-lembaga, saling tergantungnya organisasi-organisasi, dan sangat tingginya deferensiasi sosial. Demikian pula di kota, mobilitas sering terjadi di kota di bandingkan dengan di daerah pedesaan. (arifin saenal, 2012:199).

Perbandingan pendapatan desa kota terlihat sangat problematis, ini menunjukkan kesenjangan dan terjadi perbedaan

persepsi mengenai desa dan kota. Pendapat yang memungkinkan lebih banyak di kota akibat lapangan-lapangan yang ditawarkan di kota.

Sebuah badan penelitian tentang migrasi desa ke kota mengemukakan bahwa mayoritas penduduk berpindah karena alasan ekonomi. Ketika masyarakat ditanya tentang alasan keberpindahan mereka, selalu saja prospek ekonomi perkotaan yang menjadi alasan. Arus migrasi antar wilayah-wilayah juga dapat ditunjukkan dengan perbedaan pendapatan antar wilayah tersebut. Pertimbangan-pertimbangan material dalam pengambilan keputusan itu tampaknya menjadi kenyataan yang universal.

Perkembangan pembangunan pada era modernisasi telah membawa sebahagian masyarakat, khususnya Indonesia pada arus globalisasi, akibatnya pemusatan sector ekonomi pada perkotaan dan berdampak pada kepadatan penduduk di wilayah perkotaan dikarenakan mobilitas penduduk atau migrasi penduduk dari desa ke kota.

Kalau kita perhatikan pengertian penduduk, ada berbagai

macam argumen yang dapat dikemukakan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Arus perpindahan ke kota
- b. Bertambah besarnya jumlah tenaga kerja non agraris di sektor formal dan tersier
- c. Tumbuhnya pemukiman menjadi kota, dan;
- d. Meluasnya pengaruh kota di daerah pedesaan mengenai ekonomi sosial, kebudayaan dan psikologis.

Para ahli demografi cenderung menggunakan faktor-faktor pendorong (push factor) dan daya tarik (pull faktor) terjadinya urbanisasi. Jika menelaah urbanisasi, maka kedua faktor tersebut diatas harus diperhatikan. Faktor pendorong untuk urbanisasi berkaitan dengan problem pedesaan, yaitu

1. Di desa tidak ada kesempatan untuk menambah pengetahuan, jadi yang ingin maju terpaksa meninggalkan desanya.
2. Penduduk desa terutama kaum mudanya merasa tertekan oleh adat istiadatnya yang ketat menyebabkan cara hidup bersifat monoton, sehingga untuk mengembangkan

sosialisasi mereka mereka banyak yang pindah ke kota.

3. Bagi penduduk desa yang ingin mengembangkan keahliannya selain pertanian, seperti industri kecil dan kerajinan tertentu pemasarannya yang luas adalah di kota.
4. Ada juga yang meninggalkan desanya karena di desa tidak ada tempat rekreasi atau hiburan dan keindahan lainnya. (zainal Arifin, 2012:200)

Meurut Lee (1966), Todaro (1979), dan Titus (1982)., (dalam Mantra.2007; 186) berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk berpindah adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan antar daerah. Todaro menyebut motif utama tersebut sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional. Mobilitas keperkotaan mempunyai dua harapan, yaitu memperoleh pekerjaan dan harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di pedesaan. Dengan demikian, mobilitas desa kota sekaligus mencerminkan ketidak seimbangan antara kedua daerah tersebut. Oleh karena itu arah pergerakan penduduk juga cenderung ke kota

yang memiliki kekuatan-kekuatan yang besar sehingga diharapkan dapat memenuhi pamrih-pamrih ekonomi mereka. (Ida Bagoes,2007;186)

Lanjut Mantra (2007), arah pergerakan penduduk juga di tentukan oleh beberapa factor lain, seperti factor jarak, biaya dan informasih yang diperoleh. Factor jarak dan biaya dapat dilihat sebagai satu kesatuan karena dengan kemajuan di bidang transportasi maka jarak sudah merupakan fungsi uang atau biaya. Bagaimanapun juga, Mantra, (2007), jarak merupakan factor penting dalam penentuan arah, setidak-tidaknya dalam penentuan bentuk mobilitas penduduk. Kota atau daerah tujuan yang bergerak jauh dengan desa asal cenderung menghasilkan mobilitas permanen sedangkan yang berjarak sedang menghasilkan mobilitas nginap/mondok, dan yang berjarak dekat, cukup dilakukan secara ulang-alik.

Migrasi erat kaitannya dengan urbanisasi atau urbanisasi merupakan cabang dari migrasi. Berkenaan dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya

masarakat perkotaan.
(Hartomo,2008: 248).

Proses urbanisasi boleh dikatakan terjadi diseluruh dunia baik dinegara-negara maju maupun Negara-negara berkembang. Urbanisasi mempunyai akibat-akibat negative terutama dirasakan oleh Negara yang agraris seperti Indonesia. Hal ini disebabkan pada umumnya produksi pertanian yang sangat rendah apabila jumlah manusia yang dipergunakan dalam produksi tersebut"over population". Terjadinya proses tersebut dikarenakan dua aspek yaitu:

1. Berubahnya masyarakat desa menjadi masyarakat kota
2. Bertambahnya penduduk yang berasal dari desa-desa (pada umumnya dikarenakan penduduk desa merasa tertarik pada keadaan di kota).

Sehubungan dengan proses tersebut maka ada beberapa sebab yang mengakibatkan suatu daerah mempunyai penduduk yang banyak. Artinya adalah, sebab suatu daerah mempunyai daya tarik sedemikian rupa, sehingga orang-orang pendatang semakin banyak. secara umum adalah:

- 1) Daerah yang tergolong menjadi pusat pemerintahan atau kadi ibu kota (seperti contohnya Jakarta)
- 2) Tempat tersebut sangat strategis untuk usaha-usaha perdagangan / perniagaan, misalnya kota pelabuhan atau sebuah kota yang letaknya dekat pada sumber bahan mentah.
- 3) Timbulnya industry didaerah itu yang memproduksi barang maupun jass.

Sebuah kota pada hakekatnya merupakan suatu tempat pertemuan antar bangsa atau etnis. Di desa lapangan tidak terlalu luas, hal mana disebabkan oleh adanya ikatan adat istiadat yang kuat serta control social yang kuat, sehingga hubungan desa dengan daerah sekitarnya dalam kehidupan social, politik, ekonomi yang mempunyai pengaruh yang aktif. Walaupun kota memiliki fungsi demikian terhadap fisik dari kota tergantung dari pada daerah sekitarnya itu. (Hartomo, 2008: 250).

Selanjutnya (Hartomo, 2008: 250) menjelaskan dalam analisa sebab –sebab pendorong orang desa meninggalkan tempat tinggalnya secara umum adalah:

1. Di desa-desa lapangan pekerjaan pada umumnya kurang; yang dapat dikerjakan ialah terutama hal-hal yang berhubungan dengan kesulitan-kesulitan dibidang irigasi serta areal tanah yang kemungkinan secara paralel disertai dengan gejala kebanyakan penduduk. Keadaan tersebut menimbulkan pengangguran tersamar
2. Penduduk desa terutama kaum muda mudi, merasa tertekan oleh adat-istiadat ketat dan mengakibatkan suatu cara hidup yang monoton, untuk mengembangkan pertumbuhan jiwanya, banyak yang pergi ke kota.
3. Di desa –desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak orang-orang yang ingin maju, kemudian meninggalkan desanya untuk menambah pengetahuan dikota.
4. Rekreasi, merupakan salah satu factor penting dibidang spiritual, walaupun ada perkembangannya sangat lambat.
5. Penduduk desa jika memiliki keahlian lain dari pada bertani misalkan kerajinan tangan, tentu

menginginkan pasaran yang lebih luas unyuk hasil produksinya. Ini tidak didapatkan didesa.

Selanjutnya Hartomo mengemukakan pula factor penarik dari kota antara lain sebagai berikut: (Hartomo, 2008 : 151)

1. Penduduk desa mempunyai suatu anggapan, bahwa di kota banyak pekerjaan serta banyak penghasilan (uang) Oleh karena sirkulasi uang dikota jauh lebih cepat, lebih besar dan lebih banyak, maka secara relative lebih mudah untuk mendapatkan uang daripada didesa.
2. Di kota-kota lebih banyak kesempatan untuk mendirikan industri- industri dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena mudahnya mendapatkan izin terutama kredit dari bank.
3. Kelebihan modal di kota lebih banyak dari pada di desa
4. Pendidikan (terutama pendidikan lanjutan) lebih banyak di kota dan lebih mudah didapat.
5. Kota merupakan suatu tempat yang lebih menguntungkan

untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya.

6. Kota dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dari segala lapisan.

Pada dasarnya faktor-faktor orang yang melakukan migrasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Berkurangnya lapangan pekerjaan di tempat asal Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus dll Adanya wabah penyakit berbahaya Makin berkurangnya sumber-sumber alam di tempat asal Adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama atau suku di daerah asal Alasan perkawinan atau pekerjaan yang mengharuskan pindah dari daerah asal.

Adanya rasa kecocokan di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok, kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang dianggap menyenangkan misalnya iklim,

perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas umum lainnya banyak terdapat tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi penduduk-penduduk pedesaan atau kota kecil.

Mantra (2007: 181), ada empat faktor yang mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi:

- a. Faktor yang terdapat di daerah asal.
- b. Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan.
- c. Rintangan-rintangan yang menghambat.
- d. Rintangan antara daerah asal dan daerah tujuan.

Selanjutnya penulis mengembangkan pendapat Everett S Lee (dalam Ida Bagoes, 2007: 181). ada empat faktor yang menyebabkan orang-orang mengambil keputusan untuk bermigrasi:

- a. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal yang disebut faktor pendorong seperti adanya bencana alam, panen yang gagal, lapangan kerja terbatas, keamanan terganggu, kurangnya sarana pendidikan.
- b. Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan yang disebut

- faktor penarik seperti tersedianya lapangan kerja, upah tinggi, tersedia sarana pendidikan, kesehatan dan hiburan.
- c. Faktor yang terletak di antara daerah asal dan daerah tujuan yang disebut penghalang. Yang termasuk faktor ini misalnya jarak, jenis alat transport dan biaya transport. Jarak yang tidak jauh dan mudahnya transportasi mendorong mobilitas penduduk.
 - d. Faktor yang terdapat pada diri seseorang disebut faktor individu. faktor ini sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perpindahan atau tidak. Contoh faktor individu ini antara lain umur, jenis kelamin, status menikah, dan tingkat pendidikan.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi para migran melakukan migrasi sirkuler?

2. Mengapa para migran memilih Makassar sebagai tujuan migrasi sirkuler?
3. Bagaimanakah pola migrasi sirkuler pekerja informal di Makassar?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang terjadi. Pendekatan yang dimaksud untuk mengetahui tentang migrasi sirkuler (ulang-alik) orang daerah di Makassar.

HASIL PENELITIAN

Pola migrasi dalam penelitian ini terungkap melalui sejumlah informan. Ada faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor pendorong dan penariknya. Menurut Elly M Setiadi (2011:514), Kelangkaan sumber-sumber

ekonomi menyebabkan setiap individu manusia selalu berusaha untuk mengaksesnya. Keterbatasan dan kelebihan masing-masing individu menyebabkan tidak meratanya distribusi benda-benda berharga, sehingga adanya kemampuan mengakses dan peluang dalam sistem ekonomi menyebabkan pergeseran ekonomi masing-masing individu sehingga bermuara pada terciptanya struktur kelas sosial sehingga banyak orang menempuh jalur demi meningkatkan ekonomi walau dengan meninggalkan kampung sendiri.

Sesuai dengan hasil penelitian yang digambarkan pada bagian sebelumnya, jika dikaitkan dengan kepustakaan dalam penelitian ini maka secara akademik dapat dikatakan bahwa telah memenuhi standar ilmiah yang tepat. Berikut tergambar hasil penelitian yang berhubungan dengan teori atau pendapat yang relevan.

1. Faktor yang mempengaruhi migrasi

Terjadinya migrasi dipengaruhi oleh adanya daya dorong dari daerah asal dan daya tarik dari kota. Daya dorong merupakan alasan orang melakukan migrasi, sesuai dengan hasil penelitian di atas yang

dikemukakan oleh para informan adalah sebahagian dari mereka meninggalkan daerah asal karena keinginan meningkatkan taraf hidup oleh karena desakan kebutuhan. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Alan Gilbert dan Josef Guller (1996) bahwa mayoritas penduduk berpindah karena alasan ekonomi, ketika masyarakat ditanya tentang perpindahan mereka, selalu saja prospek ekonomi perkotaan yang lebih baik menjadi alasan. Seperti informan KM ia mengatakan jika berada di daerah asalnya ia kurang mampu memanfaatkan potensi jualnya sedangkan jika di kota penghasilannya dari jualan pisang cukup menjanjikan. Begitupun yang dikatakan oleh informan MR, BD, dan SS oleh karena persaingan daerah asal yang membuat pendapatan mereka kurang menjanjikan sehingga mereka memutuskan meninggalkan daerah asal, sedang di kota pendapatan mereka lebih menjanjikan. Sedangkan informan AN, AM, UJ, dan HJ berpendapat bahwa daerah asalnya tidak begitu cocok karena pendapatannya pun sangat kurang, dikarenakan penduduk di makassar atau konsumen lebih banyak jika dibandingkan dengan di

daerah asalnya lain halnya dengan SN beralasan bahwa dirinya hanya menganggur jika derada didaerahnya sehingga mereka memutuskan untuk bekerja dikota yang menurut mereka bahwa kota selain meningkatkan penghasilan, juga menurut mereka fasilitas kota juga turut menjadi alasan mereka. Selain itu, informan ID meninggalkan daerah asalnya dikarenakan adanya tekanan psikologis (teman-temannya pergi merantau) dan memutuskan untuk ke kota dimana kota menurut ID dan BD memiliki banyak teman yang rata-rata satu daerah asal. Sebagai mana yang diketahui bahwa makassar sebagai pusat bertemunya berbagai macam latar belakang individu maupun kelompok, oleh karena itu makassar juga disebut daerah perkotaan. Adanya fenomena migrasi oleh masyarakat diindonesia pada umumnya dilatar belakangi oleh tekanan ekonomi yang membuat masyarakat desa lebih cenderung ke kota. Adapun kecenderungan tersebut didasari dengan pertimbangan jarak dan lapangan pekerjaan seperti yang dikemukakan informan KM, jarak antara daerah asalnya dengan makassar berkisar 180 km dimana jarak

tersebut merupakan hal yang biasa baginya mengingat informan KM sebelum berdagang pisang ia pernah menjual kelapa muda dipasar. lain halnya dengan Informan MR yang pernah menjadi mahasiswa unismuh sampai dengan semester tiga ini menuturkan jarak antara gowa dan makassar (antang) berkisar 17 km yang menurutnya tidak begitu jauh, dimana ia berprofesi sebagai pedagang buah dikarenakan tidak sanggup membiayai kuliahnya sehingga ia memutuskan untuk bekerja. Menurut informan SS jarak daerah asalnya dengan makassar tidak begitu jauh hanya berkisar 70 km dimana jarak demikian merupakan suatu hal yang biasa baginya dan juga dikarena faktor motifasi dari sahabatnya dikampung yang mampu membangun rumah sehabis bekerja di kota. Adapun alasan yang diungkapkan informan AN ialah jarak kota dengan daerah asalnya berkisar 180 km, dimana jarak tersebut baginya tidak lah melelahkan dibandingkan dengan pendapatannya di kota sebagai penjual telur, dimana dahulunya keberadaan informan AN di kota ia berprofesi sebagai sopir pete-pete (angkutan kota). Menurut AM ia

menjadi menjadi pedagang telur karena penghasilannya di makassar cukup menjanjikan dimana sebelumnya ia pernah berprovsi sebagai pekerja bengkel ini menuturkan bahwa jarak antara daerah asalnya 250 Km, baginya jarak tersebut adalah hal yang biasa dilaluinya sejak lima tahun yang lalu apa lagi ia sudah memiliki kendaraan sendiri sehingga hal tersebut dapat menunjang mobilitasnya. Dari kebanyakan penuturan para informan yang hampir senada bahwa persoalan jaeak adalah hal yang biasa dan tidak memberatkan seperti penuturan HJ, UJ, SN, BD, ID. Adapun ID berpendapat bahwa jarak sebegitu jauh. Adapun alasan para informan mengenai lapangan pekerjaan di kota adalah karena penghasilan yang lebih baik.

2. Pola Migrasi

Seperti yang diketahui bahwa pola migrasi adalah gerak penduduk atau individu melintasi batas wilayah administrasi menuju wilayah administrasi lain. Adapun wilayah yang dilintasi mencangkup waktu atau lamanya meninggalkan asal menuju tujuan baik permanen maupun nonermanen. Adapun dari hasil penelitian pola migrasi diatas

menunjukkan suatu gerak penduduk suatu daerah menuju satu titik tujuan. Menjadi pekerja sektor informal bukanlah pekerjaan yang terbilang muda, apalagi berada didaerah perantauan, dimana pola migrasi para pelaku pekerja informal tersebut, masih memiliki ikatan yang sangat besar di daerah asalnya, dalam hal ini, para informan yang bekerja dikota tidaklah memiliki batasan untuk kembali ke daerah asalnya karena profesi yang digeluti tidak berada dibawah otoritas tertentu (Kontrak). Seperti yang diutarakan informan MR dan HJ bahwa mereka bisa pulang ke kampung kapan saja setelah dirasa cukup, dan akan kembali lagi ke kota untuk bekerja, adapun mereka pulang ke kampung karena faktor keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil menghimpun sejumlah informasi mengenai pola migrasi sirkuler pekerja informal di kota Makassar. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Faktor pendorong dan penarik bermigrasi orang dari desa ke kota karena berbagai alasan,

yakni; (1) prospek kota lebih menjanjikan dari pada di daerah asal hal inilah yang membuat orang menuju kota demi meningkatkan taraf hidup; (2) fasilitas kota lebih banyak atau lebih baik dari pada di desa; (3) jika berada atau bekerja di daerah asal pendapatan sangat kurang; (4) desakan kebutuhan, kebutuhan yang semakin meningkat membuat orang daerah harus meninggalkan daerah asalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Alasan memilih Makassar .menjadi pekerja informal nampaknya memiliki motivasi tersendiri, hal ini terjadi karena dengan adanya prospek perkotaan sehingga pertimbangan jarak para migran merupakan hal yang sudah biasa dilalui, terbukti dari banyaknya provesi yang pernah digeluti para pekerja informal ini sebelum mereka melakoni profesinya saat ini.

2. Pola migrasi. Pola migrasi sirkuler pekerja informal di Makassar, mereka yang bekerja di kota umumnya bisa pulang ke daerahnya karena jarak dan waktu tempur relatif singkat,

sifat borongan pekerjaan dan musim tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Makassar: Anugrah Mandiri.
- BPS. Kota Makassar. 2011.
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Gilbert, Alan. Gugler, Josef. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Hartomo, Arnicun Azis. 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta PT. Bumi aksara
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Cet. XI*. Jakarta: Gramedia.
- Mantra, Ida Bagoes. 2007. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Meinarno, Eko A. DKK. 2011. *Manusia Dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika
- Naim, Mochtar. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Narwoko, J Dwi. Suyanto, Bagon. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*.

Jakarta: Kencana Pranada
Media Group.

Soekanto, Soejono. 2010.
Sosiologi Suatu Pengantar.
Jakarta: PT Raja wali pers.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian,
Kualitatif, dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.

**Konflik Agraria Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Di Dusun Bondu
Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai**

**Muhammad Nur
Firdaus W. Suhaeb**

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang melatar belakangi konflik agraria antara Pemerintah dengan Masyarakat di Dusun Bondu Desa Arabika dan upaya pemerintah dalam penyelesaian Konflik Agraria di Dusun Bondu Desa Arabika. Hasil penelitian ini .menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat di Dusun Bondu Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai di latar belakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor kepemilikan tanah,faktor ekonomi,faktor hokum, faktor sosialisasi,faktor pendidikan,faktor tindakan koersif,faktor kebijakan. Adapun upaya yang di lakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yaitu Konsiliasi dengan memepertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk mencapai tujuan bersama, Mediasi pemberhentian kedua belah pihak yang berkonflik tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat dan Arbitrasi suatu keputusan yang diambil dengan di keluarkanya surat keputusan yang harus di taati oleh kedua pihak yang berkonflik.

Kata kunci : Konflik, Agraria, Pemerintah dan masyarakat

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konflik Agraria adalah pertentangan klaim mengenai satu bidang tanah, wilayah, dan sumber daya alam antara masyarakat petani dengan pemerintah. Konflik ini berawal adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang merugikan

masyarakat sehingga memicu hadirnya konflik. Struktur kepemilikan tanah di Indonesia terkadang sangat timpang, seperti masalah hak dan akses masyarakat di dusun Bondu. Hak dan akses masyarakat terhadap tanah kadang tidak diakui oleh pemerintah memicu hadirnya konflik, seperti konflik agraria antara pemerintah dengan masyarakat di dusun Bondu

desa Arabika kecamatan Sinjai Barat kabupaten Sinjai.

Kepala Dinas Kehutanan Sulsel Syukri Mattinetta mengungkapkan bahwa dari 21,1 juta Hektare hutan yang dimiliki Sulawesi Selatan, seluas 20.000 Hektare berpotensi konflik sebab persoalan batas tanah milik masyarakat dengan kawasan hutan lindung diantaranya di Kab. Sinjai, Bulukumba, Bone, Luwu Utara dan Kab. Luwu. Tanah yang masih bersengketa dijadikan hutan kemasyarakatan dan tidak boleh ada sertifikat maupun jual beli lahan. Seperti halnya di dusun Bondu desa Arabika kabupaten Sinjai merupakan persoalan hak milik tanah antara milik petani dengan milik Dinas Kehutanan yang dijadikan kawasan hutan lindung, yang ingin dialih fungsikan sebagai kawasan hutan masyarakat.

Adanya keputusan yang sepihak diambil oleh pemerintah ini mengindikasikan bahwa pengambilan kebijakan tidak melibatkan masyarakat dalam hal ini penetapan kawasan hutan

lindung yang berdampak negatif pada masyarakat, dimana tanah mereka dimasukkan dalam kawasan hutan lindung sementara masyarakat tidak tahu hal itu.

Konflik kepentingan ini mulai muncul di permukaan saat polisi kehutanan melakukan pengrusakan tanaman pohon cengkeh masyarakat yang seluas 50 Ha yang di kelola oleh masyarakat Bondu desa Arabika sebagai tanah warisan yang di tanami pohon cengkeh untuk keberlangsungan hidup masyarakat Bondu.

Konflik antara masyarakat di dusun Bondu dan pihak polisi kehutanan terjadi pada bulan November-Desember tahun 2013 dimana polisi kehutanan langsung menebang tanaman masyarakat tanpa sosialisasi.

Konflik belum selesai dilihat belum adanya kepemilikan hak tanah. Terlihat adanya demonstrasi pada hari Rabu 26 November 2014 sejumlah mahasiswa dan warga melakukan aksi unjuk rasa depan kantor dinas kehutanan dan Polres

Sinjai mendesak agar tanah warga yang masuk kawasan hutan lindung untuk di kembalikan dan meminta kepada polisi agar tidak mengintimidasi warga. Berdasarkan uraian diatas maka dianggap perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai: Konflik Agraria Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Di Dusun Bondu Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti merumuskan beberapa masalah untuk diteliti terkait Konflik Agraria antara Pemerintah dengan Masyarakat Di dusun Bondu desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai) yaitu :

- a. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya konflik agraria?
- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria di dusun Bondu desa Arabika Kecamatan

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik agraria antara pemerintah dengan masyarakat di dusun Bondu desa Arabika kecamatan Sinjai Barat kabupaten Sinjai?
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria di dusun Bondu desa Arabika kecamatan Sinjai Barat kabupaten Sinjai?

TINJAUAN PUSTAKA

a. Agraria

Sediono MP. Tjondronegoro dan Gunawan wirardi menelusuri berbagai referensi mengenai definisi agraria. Secara etimologis atau leksikal istilah Agraria berasal dari Bahasa Latin yaitu *agera* artinya : a. Lapangan; b.

pedusunan (lawan dari perkotaan); c. Wilayah Tanah negara. Agraria memiliki persamaan istilah “*Agger*” artinya a. Tanggul penahan/pelindung; b. Pematang; c. Sungai; d. Jalan tambak; e. Reruntuhan; f. Bukit (Tjondronegoro dan Wirardi, 2004).

Dari definisi diatas semuanya menekankan pada tanah yang di anggap melingkupi semuanya, ini menandakan bahwa tanah merupakan sumber penghidupan bagi manusia meminjam istilah Moch. Tauchid (1952:3), agraria adalah menyangkut soal hidup dan penghidupan manusia; tanah adalah sumber dan asal makanan bagi manusia. Siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan”. Dari pengertian di atas memberikan koneksi terhadap beberapa definisi di atas mengenai agraria.

b. Konflik

Konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran yang tidak

sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik sebagian besar masyarakat atau semua pihak yang terlibat.

Dalam kamus bahasa indonesia yang disusun oleh poerdarmito, konflik berarti pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan atau percekakan. Pertentangan sendiri bisa muncul kedalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara kedua belah pihak yang berseberangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya, sehigga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan (Rokhiman, 2013: 7).

c. Konflik Agraria

Konflik Agraria adalah pertentangan klaim mengenai satu bidang tanah, wilayah, dan sumber daya alam antara rakyat petani, termasuk masyarakat adat/lokal, dengan badan-badan penguasa tanah luas, terutama yang bergerak dalam bidang usaha produksi, ekstraksi, dan konservasi, dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut secara langsung bertindak menghilangkan klaim pihak lain.

Konflik agraria lebih diorientasikan pada penguasaan tanah dan konflik pertanahan. penguasaan Tanah yaitu terjadinya monopoli lahan pertanian oleh pihak tertentu dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat sekitarnya karena tanah di jadikan sebagai komoditas. Ketika Tanah telah menjadi sebuah komonitas berarti tanah tersebut telah memiliki nilai. Karena dengan adanya Nilai yang terkandung di dalamnya, konflik tanah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan sengketa Tanah adalah pertentangan klaim antara dua pihak atau lebih

mengenai suatu objek tanah yang sama.

d. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas 2 tipe ; kelompok semu(quasi group) dan kelompok kepentingan (interest group). Kelompok semu merupakan kumpulan dari pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan yang inilah menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat (Rokhiman 2003 :21-22).

e. Masyarakat desa

Masyarakat desa didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Masyarakat desa menurut

Soedjatmoko sebagaimana dikutip dalam Sulito (2011), yang dicirikan sebagai masyarakat yang memiliki ikatan yang relatif kuat karena adanya rasa memiliki satu sama lain.

Berdasarkan pendapat menurut Soekanto (1982), interaksi sosial dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif dimana Interaksi asosiatif, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif, merupakan bentuk interaksi sosial yang menguatkan ikatan sosial, jadi bersifat mendekatkan atau positif yang mengarah kepada bentuk-bentuk asosiasi (hubungan atau gabungan) seperti:
 - a. Kerja sama adalah suatu usaha bersama antar orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
 - b. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan.
 - c. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran.
 - d. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri.
2. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif, merupakan bentuk interaksi yang merusak ikatan sosial, bersifat menjauhkan atau negatif dan yang mengarah kepada bentuk-bentuk pertentangan atau konflik seperti :

- a. Persaingan adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya.
- b. Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada diantara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.
- c. Konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya jurang

pemisah yang mengganjal interaksi sosial mereka yang bertikai tersebut.

f. Pemerintah

Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya gubernaculum. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan informan penelitian berjumlah 11 orang. Di peroleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria masyarakat yang terlibat konflik yang berumur 27-56 tahun, Pemerintah dalam hal ini Kepala Desa dan Lurah, dan dinas Kehutanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tahap teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

a. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Agraria

Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat menyangkut persoalan tanah dapat membangkitkan pertikaian (konflik). Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dalam system sosial akan saling mengejar tujuan yang berbeda. Seperti hal penelitian ini adanya kepentingan yang

berbeda antara pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah mengklaim bahwa tanah itu sebagai kawasan hutan lindung dan sehingga mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan pengrusakan tanaman masyarakat sementara masyarakat menganggap tanah yang di kelolahnya sebagai tanah warisan. Hal ini sesuai dengan pandangan Lock Wood, bahwa kekuatan-kekuatan yang saling berlomba dalam mengejar kepentingannya akan melahirkan mekanisme ketidakteraturan sosial (social disorder). Pemerintah dengan masyarakat Bondu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Adanya kekuatan dari pihak pemerintah yang mengatas namakan hukum dan sebuah kebijakan yang di ambil pemerintah sehingga melakukan sebuah tindakan untuk kepentingannya, sementara dari pihak masyarakat yang memahami bahwa itu adalah sebuah tanah warisan dan persoalan ekonomi sehingga tidak ada solusi lain selain mempertahankannya.

Adanya perbedaan kepentingan ini seperti dalam teorinya Dahrendorf yang membedakan golongan yang terlibat konflik itu menjadi dua tipe. Kelompok semu (quasi group) merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Tipe yang kedua adalah kelompok kepentingan (interest group), terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.

Pada konflik pemerintah dan masyarakat di Dusun Bondu, terjadi harapan peran yang disadari (kepentingan tersembunyi telah disadari). Kelompok kepentingan ini telah memiliki struktur organisasi dan tujuan yang jelas yang di perankan oleh pihak pemerintah. Masyarakat Bondu menyadari kepentingan yang ia

perjuangkan yakni mempertahankan tanahnya sebagai sumber penghidupannya. Kekuasaan menjadi penyebab timbulnya perlawanan. Esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. seperti halnya Polhut atas perintah dinas kehutanan melakukan tindakan anarkis untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Jadi, konflik kepentingan menjadi fakta tidak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan.

Perbedaan kepentingan mengenai kehidupan yang mendasar dalam hal ini persolan tanah menjadikan persetujuan karena sebuah kebijakan yang merugikan salah satu pihak. Pandangan Lewis A. Coser (Marga M. Poloma, 1992:103) mengakui beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus,

yang menunjukkan pada proses lain yaitu konflik sosial. Dalam berbagai situasi konflik, Coser membahaskan konflik yang realistik. Konflik yang realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus/tertentu yang terjadi dalam hubungan kedua belah pihak.

Kenyataan ini terlihat pada pandangan teori konfliknya berikut ini. Menurut Dahrendorf (Margaret M. Poloma, 1992: 137) pertentangan kelas harus dilihat sebagai kelompok-kelompok pertentangan yang berasal dari struktur kekuasaan asosiasi-asosiasi yang terkoordinir secara pasti. Kelompok-kelompok yang bertentangan itu sekali mereka ditetapkan sebagai kelompok kepentingan, akan terlibat dalam pertentangan yang niscaya akan menimbulkan perubahan struktur sosial.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain : 1. Kelompok Semu (*quasi group*) 2. Kelompok Kepentingan

(*manifes*) 3. Kelompok Konflik Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan).

b. Upaya Penyelesaian Konflik

Akar dari persoalan konflik dikawasan hutan lindung karena sebuah persoalan tidak adanya kepastian pengelolaan antara pemerintah dengan masyarakat. Tumpang tindih klaim atas kebijakan yang tidak terformulasi jelas yang berakibat penutupan akses masyarakat. Terjadinya konflik agraria dalam masyarakat jelas memiliki dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat sebagai akibat dari adanya keguncangan sosial,

oleh karenanya berbagai upaya penanganan konflik telah dilakukan agar kembali tercipta tatanan sosial yang lebih baik . Dengan mempertemukan kepentingan pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan perselisihan ini dilakukan Kantor kepala desa Arabika.

Sejalan yang diungkapkan Nasikun dalam (Zaenal, 2002:26). Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial yang di lakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang dapat memberikan keputusan dengan adil. Seperti halnya di lakukan oleh pemerintah sinjai dengan di keluarkannya peraturan terkait sengketa tanah dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat Bondu tetap mengolah lahan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai konflik agraria antara pemerintah dengan masyarakat di dusun Bondu desa Arabika kec.Sinjai barat Kab. Sinjai. Mengenai faktor faktor yang melatar

belakangi konflik agraria yaitu mengenai kepemilikan tanah, dimana tanah yang dikelola oleh masyarakat di klaim sebagai kawasan hutan lindung, faktor ekonomi menjadi alasan masyarakat tetap mempertahankan tanahnya karena tidak adanya penghidupan atau pekerjaan lain, rendahnya pendidikan warga bondu sehingga ketidaktahuan hukum apalagi dalam pengurusan sertifikat tanah, faktor kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah mengarahkan Polhut melakukan tindakan refresif, sebuah tindakan menurut pemerintah itu keharusan untuk menjaga kestabilan dan atas landasan hokum mereka melakukan pencabutan tanaman masyarakat, Tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat sehinggam memicu konflik terbuka antara pemerintah dengan masyarakat Bondu desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Upaya yang di lakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sehingga dalam penyelesaiannya di kelurkannya surat keputusan dari bupati sinjai mengenai pengelolaan lahan sebagai landasan hukum.

Saran

1. Khususnya pemerintah daerah ketika mengeluarkan kebijakan baru mesti berpihak sama masyarakat bukan mengusir masyarakat dari tanah leluhur mereka sebab dapat terjadi kemiskinan struktural.
2. pemerintah seharusnya melindungi hak hak rakyat bukan untuk menghancurkan rakyat sendiri dan tidak menjadikan masyarakat dalam kemelaratan
3. membantu masyarakat dalam kepengurusan sertifikat

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.Savitri, Laksmi, Valentin. A, Ahmad. N.L. *Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis*. Yogyakarta: Sains. 2010.
- Andi MulianiSultani. *Konflik dan Kebijakan Agraria di Indonesia dari Masa ke Masa*. tugas kebijakan pertanahanprogram studi ilmu perencanaan wilayahsekolah pascasarjana institut pertanian Bogor.7 November 2012.
- Gunawan, Wiradi., Benyamin. W., William L. Coller., Soentoro.. Makali., Chris M. *Ranah Studi Agraria Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta: STPN Press. 2009
- Ismaya,Samun. *Pengantar hukum agrarian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1991. Cet. XI.
- Marlang, Abdullah. *Pengantar hukum indonesia*, Makassar: As. Center, 2009.
- Ranoemihardja, R. Antang. *Perkembangan hukum agraria di indonesia, aspek- aspek dalam pelaksanaan UUPA dan peraturan undang undangan lainnya dibidang agraria di indonesia* , Bandung : Tarsito, 1982
- Rokhiman, Muryanti, Dwi Nugroho Dawar. *Teori konflik dan*

- konflik agraria pedesaan*, Bantul: Kreasi Wacana, 2013
- Rousseau, Jean Jacques. *Kontrak sosial atau prinsip hukum-politik*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Salim, Emil. *Pembangunan berwasasan lingkungan*, Jakarta :LP3ES, 1986.
- Savitri, Laksmi Adriani, Mohammad Sohibuddin, & Surya Saluang. *Memahami & Menemukan Jalan Keluar Dari Problem Agraria & Krisis Ekologi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan nasional. 2010.
- Soetomo, S. H. *Pembebasan, pencabutan, permohonan, hak atas tanah usaha nasional*, Surabaya: 1984.
- Sutiknyo, Iman. *Politik agraria nasional*, Yogyakarta : Gadjah Mada University, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suharsaputra, Umar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung ; PT Refika Aditama
- Susan, Novri. *Pengantar sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta : Kencana. 2009.
- Tjondronegoro, Sesiono.MP. & Gunawan Wiradi (2004): "Menelusuri Pengertian Istilah Agraria". Dalam Jurnal Analisis Sosial. Vol.9. No. 1, April 2004. Bandung.
- Tjondronegoro, Soediono. *Keeping-keeping sosiologi dari pedesaan*. Bogor : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 1999.
- Wiradi, Gunawan. *Seluk Beluk Masalah Agraria-reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan nasional.2009.
- 2. Referensi Undang- Undang:**
- Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
- Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan.

Peraturan presiden republik indonesia Nomor 28 tahun 2011 Tentang penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah.

Peraturan menteri kehutanan republik indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/ 2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui mitra kehutanan.

Undang- undang republik indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan dan perusakan hutan.

3. Sumber lain

- a. <http://koranpembebasan.wordpress.com/2013/04/09/pernyataan-sikap-gerakan-rakyat-anti-perampasan-tanah-dan-kekerasan/>
- b. <http://makassar.tribunnews.com/search/?q=konflik+agraria+di+sinjai+barat+november+2013&cx=partner-pub-7486139053367666%3A7016215912&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8>
- c. <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/category/budaya-2/page/44/>
- d. <http://kabaramansulsel.wordpress.com/category/sinjai/>
- e. (<http://www.mongabai.co.id/tag/kriminalisasi-warga-sinjai/>)
- f. <http://news.okezone.com/read/2012/03/07/340/588432/20-000-hektare-hutan-sulsel-rawan>
- g. http://www.makassartv.co.id/index.php?option=com_content&id=13341:batas-kawasan-hutan-lindung-di-sinjai-ditinjau-ulang&Itemid=58
- h. <http://makassar.tribunnews.com/2014/11/26/mahasiswa-desak-dinas-kehutanan-sinjai-kembalikan-hutan-rakyat>

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI MELALUI GABUNGAN
KELOMPOK TANI DI DESA PATANYAMANG KACAMATAN CAMBA
KABUPATEN MAROS**

**Oleh:
Syaifulah
Mario**

**Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat tani ikut serta dalam pengelompokan dan pengembangan gabungan kelompok tani di Desa Patanyamang kecamatan Camba Kabupaten Maros, serta untuk mengetahui bentuk pemberdayaan yang dilakukan gabungan kelompok tani di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dan ditentukan informan sebanyak 12 orang dengan kriteria tertentu, 1 orang ketua gapoktan, 1 orang PPL, 3 orang ketua kelompok tani dan 7 orang anggota kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan patanyamang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif dengan tahapan sebagai berikut : mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong masyarakat tani bergabung dalam pengelompokan dan pengembangan gapoktan di Desa Patanyamang yaitu, faktor internal (ekonomi, status dan harga diri, keamanan dan pendidikan) faktor external (adanya interaksi formal dalam gapoktan, adanya struktur dalam gapoktan, adanya kedekatan ruang dan daerah, dan gapoktan dapat memberikan kenyataan serta anggota dalam gapoktan saling mengisi dalam menghadapi tantangan dan rintangan). Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan gapoktan Patanyamang diantaranya pelatihan keterampilan dan pendampingan melalui proses penyuluhan, penguatan potensi yang dimiliki masyarakat tani melalui proses kerjasama dengan KUD dan Pedagang, menyalurkan bantuan dari pemerintah berupa sarana produksi pertanian, dan penguatan modal usaha tani dengan usaha. Namun terlepas dari semua itu masih ada hambatan-hambatan yang dialami gapoktan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tani.

Kata Kunci: Petani, Kelompok Tani, Pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Melihat kenyataan yang ada di masyarakat bahwa petani saat ini sangat sulit untuk mendapatkan

pupuk, obat, mendapatkan bibit padi unggul, sehingga petani merasa sulit untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Padahal pemerintah

telah menganggarkan beberapa persen APBN untuk pertanian di Indonesia bahkan juga diadakannya subsidi pupuk bagi petani kecil. Namun sampai saat ini nasib petani masih saja terpuruk, belum mampu mengangkat derajat hidup keluarganya.

Banyak orang yang bilang bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan beras, namun melihat kenyataannya masih banyak sekali orang yang mengalami kelaparan. Hal ini menjadi salah satu tugas negara untuk mampu mensejahterakan rakyatnya. Peraturan Menteri Pertanian No. 273 tahun 2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, dalam hal ini petani diatur dan ditata dalam wadah kelompok tani ditiap dusun dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) ditingkat desa sehingga memudahkan proses penyuluhan pertanian.

Gapoktan Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian. Serta gapoktan desa Patanyamang diharapkan dapat menjalankan fungsi kemitraan

dengan adil dan saling menguntungkan. Peran utama Gapoktan adalah Pertama, Gapoktan difungsikan sebagai lembaga sentral dalam sistem yang terbangun misal terlibat dalam penyalur benih bersubsidi yaitu bertugas merekap daftar permintaan benih dan nama anggota. Kedua, Gapoktan dibebankan untuk peningkatan kebutuhan pangan tingkat lokal. Ketiga, mulai tahun 2007, Gapoktan dianggap sebagai lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP) sehingga dapat menerima dana penguat modal yaitu dana pinjaman yang dapat digunakan untuk membeli gabah petani pada saat panen raya sehingga harga gabah tidak terlalu jatuh. Dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dianggap perlu mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui peranan kelompok tani dalam memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian sebagai berikut: *"Pemberdayaan Masyarakat Tani Melalui Gabungan Kelompok Tani di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros"*.

KERANGKA KONSEPTUAL

Secara konseptual pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut Shardlow melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya, (Isbandi Rukminto Adi, 2008: 78-79).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Pemberdayaan harus menjadi tujuan dari semua pembangunan masyarakat. Pengembangan masyarakat, bagaimanapun, dapat memiliki tujuan pemberdayaan lebih sederhana. Demikian pula, setiap strategi yang memperkuat struktur yang menentang pemberdayaan mungkin justru melemahkan dari pada memperkuat kegiatan masyarakat. Bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah.

Pemberdayaan masyarakat petani adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usaha secara berkelanjutan.

Puncak pengaruh langsung maupun tidak langsung pelaksanaan penyuluhan adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. Namun, landasan

penyuluhan yang selama ini diketahui hanya sekedar meningkatkan produksi perlu dikaji kembali. Selain itu, kelembagaan atau institusi (pendidikan atau pemerintahan atau birokrasi) yang juga lebih berorientasi pada peningkatan produksi sektor pertanian (termasuk subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) juga perlu ditinjau kembali.

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Kelompok-kelompok sosial merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari kumpulan-kumpulan individu yang hidup bersama dengan

mengadakan hubungan timbal balik yang cukup intensif dan teratur, sehingga dari padanya diharapkan adanya pembagian tugas, struktur, serta norma-norma tertentu yang berlaku bagi mereka (Narwoko & Suyanto, 2004: 23).

Pola-pola pembinaan tingkah laku dapat ditempuh melalui kelompok sosial dimana setiap individu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bagi kelompok. Dalam kehidupan individu di keluarga, kelompok belajar, teman sepermainan dan masyarakat, tingkah laku individu sangat dipengaruhi kelompok-kelompok tersebut. (Santoso, 2014: 201)

Smith mengemukakan bahwa kelompok sosial adalah sebagai suatu unit yang terdiri dari sejumlah orang yang memiliki persepsi kolektif, mengenai kesatuan mereka dan memiliki kemampuan untuk bertindak dalam cara yang sama terhadap lingkungan mereka. Sementara itu, Bales mengatakan bahwa kelompok adalah sejumlah individu yang berinteraksi dengan sesamanya secara tatap muka atau serangkaian pertemuan, dimana masing – masing anggota tersebut saling menerima impresi atau persepsi anggota lain dalam suatu

waktu tertentu dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kemudian yang membuat masing-masing anggota bereaksi sebagai reaksi individual (Huraerah & Purwanto, 2010: 3).

Soetomo dalam (Huraerah & Purwanto, 2010: 6) membagi beberapa ciri-ciri kelompok sebagai berikut:

1. Adanya motif yang sama. Kelompok sosial terbentuk karena anggota – anggotanya mempunyai motif yang sama. Motif yang sama ini merupakan pengikat sehingga setiap anggota kelompok tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Adanya sikap *In- Group* dan *Out Group*. Jika ada sekelompok manusia yang mempunyai tugas yang sulit atau mengalami kepahitan hidup bersama, mereka akan menunjukkan tingkah laku yang khusus. Apabila orang lain yang di luar kelompok itu bertingkah laku seperti mereka, mereka akan menyingkirkan diri. Sikap yang di tunjukkan oleh kelompok yang kelompok itu disebut sikap *out group* atau sikap terhadap “orang luar”.baru kemudian menerima orang itu dalam segala kegiatan kelompok.sikap menerima ini disebut sikap *in group* sikap terhadap “orang dalam”
3. Adanya solidaritas. Terdapatnya solidaritas yang tinggi dalam kelompok tergantung kepada kepercayaan setiap para anggota akan kemampuan orang lain untuk melaksanakan tugas dengan baik.makin tinggi solidaritas kelompok makin tinggi pula *sense of belonging*.
4. Adanya struktur kelompok. Struktur kelompok adalah suatu sistem mengenai relasi antara anggota-anggota kelompok berdasarkan peranan dan status mereka serta sumbangan masing-masing dalam interaksi kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
5. Adanya Norma Kelompok. Yang di maksud dengan norma kelompok disini adalah pedoman-pedoman yang mengatur tingkah laku individu dalam suatu kelompok.

Robert K. Merton (Narwoko & Suyanto, 2004 :30) Mengemukakan pembedaan kelompok sosial lainnya didasarkan pada derajat interaksinya

ialah *membership group* dan *reference group*. batas-batas yang dipakai untuk menentukan keanggotaan seseorang pada kelompok tidak dapat dilakukan secara mutlak, karena perubahan-perubahan keadaan akan memengaruhi derajat interaksi di dalam kelompok, sehingga ada kalanya seorang anggota tidak begitu sering berkumpul dengan kelompoknya, walaupun secara resmi dia belum keluar dari kelompok bersangkutan.

Istilah organisasi secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu kesatuan orang-orang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu. Istilah sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam masyarakat. Organisasi sosial yang merupakan gambaran dari kedua istilah tersebut dapat diartikan sebagai suatu susunan atau struktur dari berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut merupakan suatu kesatuan yang teratur (Abdulsyani, 1992: 63-68).

Organisasi sosial dalam arti luas dapat diartikan sebagai jaringan

tingkahlaku manusia dalam ruang lingkup yang kompleks pada setiap masyarakat. Dalam arti sempit dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga, sekolah dan sebagainya. Secara ringkas organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian pelapisan terstruktur hubungan antar manusia yang saling ketergantungan.

Gapoktan adalah gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar (1) Kepentingan bersama antara anggota, (2) Berada pada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara anggota, (3) Mempunyai kader pengelolaan yang berdedikasi untuk menggerakkan petani, (4) Memiliki kader atau pimpinan yang diterima oleh petani lainnya, (5) Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, (6) Adanya dorongan atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat.

Membangun Gapoktan yang ideal diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang

berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan Gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani, pembiayaan dan pemasaran. Gapoktan merupakan kelembagaan ekonomi di pedesaan yang didalamnya bergabung kelompok-kelompok tani. Gapoktan sebagai aset kelembagaan dari Kementerian Pertanian diharapkan dapat dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh komponen masyarakat pertanian mulai dari pusat, provinsi, kab/kota hingga kecamatan untuk dapat melayani seluruh kebutuhan petani di pedesaan.

Menurut Davis & Soemardjan dalam (Torro, *dkk*, 2013: 2) manusia merupakan hewan masyarakat yang memiliki kecerdasan dibandingkan dengan binatang yang sebenarnya. Artinya manusia merupakan kelompok hewan yang memiliki pikiran dan hewan hanya memiliki insting.

Gibson dalam (Sunarru, 2011: 15) mengemukakan beberapa alasan orang tertarik masuk dalam suatu kelompok diantaranya yaitu (a) kelompok membantu memberikan kepuasan psikologis yang utama, (b) kelompok membantu mencapai

tujuan yang tidak dapat dicapai secara individu, (c) anggota kelompok memberikan pengetahuan dan informasi yang tidak tersedia di luar kelompok, (d) kelompok dapat memberi kebutuhan keamanan, keselamatan dan perlindungan dari musuh; dan (e) kelompok juga mendukung keberadaan identitas sosial yang menjadi konsep diri.

Yusuf dalam (Huraerah & Purwanto, 2010 :28) Membagi teori yang dapat dianggap sebagai teori awal dan sederhana dalam melihat keinginan manusia untuk bergabung dalam kelompok dengan mengutip pendapat beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Kedekatan (*Proximity Theory*). Teori ini melihat segi kedekatan (*proximity*) dalam pengertian spasial dan geografis. dalam hubungan yang jelas teori kedekatan menganggap seseorang berhubungan dengan orang-orang lain, disebabkan adanya kedekatan ruang dan daerah (*spatial and geographical proximity*). Pendekatan ini hanya melihat permukaan dari gejala kelompok tersebut, dan kurang melihat kompleksitas hubungan

dan interaksi yang terjadi dalam kelompok tersebut.

- b. Teori Yang Mendasarkan Pada Aktivitas-Aktivitas, Interaksi-Interaksi, dan Sentimen-Sentimen (Perasaan Dan Emosi). Homans mendasarkan teorinya pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen (perasaan dan emosi). ketiga element tersebut, satu dengan yang lainnya saling berhubungan secara langsung.
- c. Teori Keseimbangan (*A Balance Theory of Group Formation*). Adalah Newcomb, seseorang psikolog sosial terkenal yang yang mengajukan teori ini. Teori ini menjelaskan bahwa seorang tertarik kepada orang lain, didasarkan atas kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu dengan yang lain. Newcomb menekankan aspek-aspek psikologi sebagai faktor dominan dalam proses pembentukan kelompok tersebut.
- d. Teori Alasan Praktik (*Practical Teori*). Teori yang diajukan Reitz ini adalah menekankan segi motif/maksud orang

berkelompok. Teori ini mengacu pada teori kebutuhan Maslow, yang menurut *practical* teori ini “*the group it self is the source of needs*”(kelompok itu sendirimampu memenuhi kebutuhannya sendiri). Menurut teori ini kelompok kelompok tersebut cenderung memberikan kepuasan kebutuhan sosial yang mendasar dari orang yang berkelompok. Letak nilai praktis dari teori ini, disebabkan oleh alasan-alasan tertentu, misalnya: alasan ekonomi, status sosial, keamanan, politis, dan alasan sosial lainnya.

Menurut Narwoko & Syarbini dalam (Torro *dkk*, 2013: 7) kelompok dapat menarik individu dengan beberapa alternatif, yakni (1) tujuan kelompok dan lembaga kemasyarakatan mempunyai anggota yang saling mengisi; (2) kelompok dan lembaga kemasyarakatan memiliki pemimpin yang karismatik; (3) reputasi kelompok dan lembaga kemasyarakatan memberikan kenyataan; (4) anggota saling mendukung dan menolong satu

sama lain untuk mengatasi rintangan dan tantangan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti penulis sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat tani ikut serta dalam pengelompokan dan pengembangan gabungan kelompok tani di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros?
- 2) Bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh gabungan kelompok tani di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dan ditentukan informan sebanyak 12 orang dengan kriteria tertentu 1 orang ketua gapoktan, 1 orang PPL, 3 orang ketua kelompok tani dan 7 orang anggota kelompok tani yang tergabung dalam

gapoktan patanyamang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif dengan tahapan sebagai berikut : mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

1. **Faktor-faktor yang mendorong masyarakat tani ikut serta dalam pengelompokan dan pengembangan gabungan kelompok tani di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros.**

Ada banyak faktor yang menjadi alasan masyarakat tani bergabung dalam gapoktan baik faktor internal dan external. Dari hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki ketergantungan yang tinggi. ditambah lagi dengan perkembangan masyarakat modern, yang menunjukkan segi diferensiasi sosial, dengan pembagian kerja yang semakin kompleks. Sebagai mana disinyalir Durkheim semua

spesialisasi berguna bagi kehidupan manusia, sehingga kehilangan satu fungsi sosial yang dirasakan. Karena manusia tidak dapat dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya, sehingga kehadiran kelompok merupakan suatu gejala sosial yang dibentuk secara sadar oleh masyarakat itu sendiri.

a) faktor internal

1) status dan harga diri

Seseorang bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan status atau harga dirinya. Dengan bergabung dalam kelompok tersebut maka anggota-anggotanya akan merasa harga diri dan statusnya menjadi semakin tinggi di masyarakat meskipun belum tentu masyarakat menilainya seperti itu.

Lebih lanjut dalam hasil penelitian yang telah dipaparkan informan yaitu adanya tanggung jawab yang dimiliki sebagai ketua kelompok karena manakala pemimpin mampu memaingkan peran yang baik sesuai dengan situasi anggotanya, mampu meningkatkan kesiapan kerja bagi anggota yang kurang mampu baik kesiapan psikologis,

motivasi kerja, sehingga mampu meningkatkan aktivitas anggota dan kegiatan kelompoknya dalam berbagai kegiatan.

2) ekonomi

Dalam hasil penelitian faktor ekonomi juga yang menyebabkan masyarakat tani di Desa Patanyamang ikut serta dalam gapoktan dimana mereka menjelaskan bahwa Secara garis besar keinginan untuk menjadi anggota gapoktan adalah untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya agar mampu menjadi petani yang mandiri dan berdaya saing serta mampu mengangkat derajat keluarganya. Karena masyarakat setempat yakin bahwa jika mengharapkan hasil pertanian dan perkebunan saja maka kondisi ekonomi keluarganya akan semakin menurun, sehingga mereka tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya.

3) keamanan

Alasan keamanan menyebabkan masyarakat tani di Desa Patanyamang bergabung dalam gapoktan, dengan bergabungnya individu dapat mengurangi rasa tidak aman akibat "sendirian". Karena dalam

gapoktan para petani bisa saling membantu satu sama lain dan dapat melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama. Orang merasa kuat, punya sedikit keraguan dan lebih tahan terhadap ancaman tatkala menjadi bagian dari kelompok. Dengan adanya rasa aman ini maka akan lebih aktif dan kreatif dalam mencapai tujuan –tujuan tertentu, baik tujuan individu maupun tujuan kelompok.

4) Pendidikan

Terlepas dari faktor ekonomi dan faktor alasan keamanan, adapun alasan yang di dapatkan dari hasil penelitian yang mendasari masyarakat bergabung dalam gapoktan yaitu karena tingkat pendidikannya yang rendah. Sehingga belum banyak mengetahui teknik-teknik yang dapat meningkatkan penghasilan mereka, mereka hanya mengandalkan kepercayaan dan metode turun-temurun dari orang tua mereka terdahulu dengan pemilihan bibit dengan kuantitas yang rendah serta pengolahan sawah secara tradisional dengan alat pertanian yang sangat sederhana. Maka dari itu mereka bergabung dalam

gapoktan guna mendapatkan inovasi-inovasi baru dari proses penyuluhan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan gapoktan.

Orang-orang yang bekerjasama dalam suatu kelompok karena mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan yang penting. bekerjasama dalam wadah kelompok tujuan-tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai. Secara fisik tenaga yang terhimpun oleh kelompok lebih besar dan secara mental intelektual ide, gagasan maupun pendapat akan lebih berkualitas dan memberikan kontribusinya terhadap keberhasilan kelompok.

Maka dari itu faktor internal yang mendorong masyarakat tani bergabung dalam pengelompokan dan pengembangan gapoktan yaitu faktor status sosial, faktor ekonomi, faktor keamanan, dan faktor pendidikan. Berdasarkan teori yang diajukan Reitz yang menekankan segi motif atau maksud orang berkelompok. Dengan mengacu pada teori kebutuhan Maslow menurut teori ini cenderung memberikan kepuasan kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar

dari orang berkelompok. Letak nilai praktisnya yaitu misalnya: alasan ekonomi, status sosial, keamanan, politis dan alasan sosial lainnya

b) Faktor external

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat dijelaskan bahwa faktor external yang menyebabkan masyarakat tani di Desa Patanyamang bergabung dalam gapoktan yaitu:

1) adanya Interaksi secara formal yang terjadi dalam gapoktan yang dapat dilakukan secara intens atau erat. Dengan menjadi anggota gapoktan maka interaksi yang terjadi dapat lebih erat, lebih bersahabat dan akrab diantara mereka, hingga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih dalam kelompok tersebut. Manusia sebagai makhluk social secara alami akan mengadakan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Namun, dalam perkembangannya interaksi merupakan hal yang dipelajari dalam kehidupan selanjutnya, interaksi merupakan suatu proses. Oleh karena itu, ada yang baik dalam interaksi seseorang, tetapi ada pula yang kurang baik. Hal demikian

menunjukkan bahwa interaksi merupakan suatu kemampuan yang dipelajari. Interaksi merupakan suatu keterampilan, sesuatu sebagai hasilnya.

2) Adanya struktur dalam gapoktan. Struktur adalah pembagian tugas masing-masing anggota kelompok, sehingga ada hirarki yang jelas dalam kelompok bersangkutan. Kelompok tentu dapat diorganisasikan dengan berbagai macam cara. Maka dalam hasil penelitian dengan adanya struktur dalam gapoktan, maka kelompok tani akan memiliki pembagian tugas masing-masing anggotanya, masing-masing akan mempunyai status dan peran. Karena dasar pembentukan kelompok tani yang satu berbeda dengan kelompok tani yang lain, namun semuanya tentu mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam gapoktan.

3) Kedekatan Ruang dan Daerah. Selanjutnya faktor yang didapatkan dalam hasil penelitian yaitu adanya kedekatan ruang dan daerah. Beberapa informan menjelaskan

bahwa mereka bergabung dalam gapoktan karena adanya kesamaan wilayah pertanian dan kesamaan usaha tani diantara mereka, dengan bergabungnya dalam gapoktan maka mereka akan lebih mudah mendapatkan bantuan misalnya irigasi, bibit dan bantuan lainnya.

- 4) Kelompok memberikan kenyataan. Selanjutnya yang menjadi faktor bergabungnya masyarakat tani dalam gapoktan patanyamang yaitu dengan bergabungnya dalam kelompok maka gapoktan dapat memberikan kenyataan. Dibuktikan sendiri oleh beberapa informan dalam hasil penelitian bahwa bergabung dengan gapoktan, banyak manfaat yang didapat antara lain pada saat musim tanam kurang dari tiga bulan gapoktan memberi tahu kepada anggotanya, akan mendapat bantuan sarana produksi pertanian berupa bibit, pupuk dan obat, selain itu pada saat musim panen gapoktan tidak henti-hentinya membantu anggotanya jika ada anggotanya yang ingin menjual hasil

pertaniannya karena gapoktan telah bekerja sama dengan KUD dan Pedagang.

Adapun alasan-alasan lainya yang didapatkan dalam hasil penelitian bahwa masyarakat tani bergabung dalam gapoktan karena anggota kelompok saling menolong dalam menghadapi tantangan dan rintangan.

2. Bentuk bentuk pemberdayaan yang dilakukan gapoktan patanyamang

Berdasarkan dari hasil penelitian ada beberapa bentuk pemberdayaan yang dilakukan gapoktan di Desa Patanyamang Kabupaten Maros:

- 1) Pemberdayaan masyarakat tani melalui peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan dengan cara: (1) pembelajaran pemahaman dan keterampilan tentang budidaya ikan lele dombo, pembuatan pupuk bokasi, PHT padi yang dilaksanakan melalui sistem penyuluhan, maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat akan pentingnya kelembagaan, (2) peningkatan partisipasi petani, maksud dari sistem

pemberdayaan ini adalah untuk mengetahui potensi masyarakat melakukan kerjasama dalam mengelola kelembagaan untuk mendukung program ketahanan pangan pedesaan.

- 2) Pemberdayaan masyarakat dari segi penguatan modal usahatani dilaksanakan melalui usaha: (1) pemberian bantuan sarana produksi, maksud dari program pemberdayaan ini adalah untuk meringankan biaya produksi, terutama biaya variabel yang setiap musim tanam membebani petani, karena harga benih, pupuk dan pestisida setiap musim tanam selalu berfluktuasi. (2) pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) bentuk pemberdayaan ini yaitu untuk membantu petani yang kekurangan modal usahatani dalam suatu kelompok dengan pemberian modal usaha secara bergulir agar petani dapat mengelola usahatannya dengan berkerjasama.

Ketika kekuatan dan status petani meningkat melalui Gapoktan maka para pemilik modal dan penyedia modal seperti perbankan tidak akan

lagi memandang sebelah mata para petani seperti yang dialami selama ini. Dengan semakin kuatnya petani melalui Gapoktan, petani tidak akan lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah karena mereka akan lebih mandiri dan lebih leluasa mengembangkan usaha mereka.

- 3) Proses pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan situasi atau iklim sosial yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat tani merupakan proses pemberdayaan yang berhubungan dengan menyediakan input untuk memperkuat posisi petani dalam mengembangkan gapoktan pedesaan. Proses pemberdayaan ini dilakukan melalui penguatan pemberian akses informasi pasar agar petani dapat mengetahui perkembangan harga beras pada setiap musim panen, sehingga mereka tidak terjerat oleh sistem ijon yang senantiasa berkembang di pedesaan. Selain itu penguatan potensi

masyarakat melalui proses pemberdayaan ini yaitu dengan membangun jalan akses usahatani, seperti: jalan, irigasi, listrik, dan lain-lain yang merupakan aspek yang penting dalam memperkuat potensi masyarakat sebagai usaha membuka keterisoliran dan keterbelakangan penduduk suatu wilayah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal yang mendorong masyarakat tani bergabung dalam pengelompokan dan penegembangan gapoktan, diantaranya yaitu: faktor status dan harga diri, faktor ekonomi, faktor keamanan, dan faktor pendidikan.
2. Faktor external yang mempengaruhi masyarakat tani bergabung dalam pengelompokan dan penegembangan gapoktan, diantaranya yaitu: adanya interaksi yang formal dalam gapoktan, adanya struktur dalam gapoktan yang dapat

menentukan peran masing-masing aggotanya, serta adanya kedekatan ruang dan daerah, anggota kelompok saling mendukung dan kelompok memberikan kenyataan.

3. Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan gapoktan di antaranya:

- a. Pelatihan ketrampilan dan pendampingan. Kedua cara tersebut merupakan salah satu usaha untuk merubah pola pikir anggota gapoktan, karena anggota gapoktan masih berpendidikan rendah maka mereka lebih mengerti dan percaya jika setiap kegiatan yang dilakukan praktek langsung.
- b. Penyaluran bantuan dari pemerintah: Gapoktan mengkoordinasi kebutuhan anggota gapoktan melalui kelompok tani untuk mendapatkan benih unggul, pupuk dan obat-obatan, Sehingga dengan adanya gapoktan maka kebutuhan petani menjadi terpenuhi, petani tidak terlalu sulit untuk mendapatkan

- saprotan, sehingga dalam kegiatan tanam petani tidak merasa mendapat kesulitan yang berarti.
- c. memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat tani: pemberian bantuan sarana produksi, pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) seperti pengemukan sapi, budidaya lele dumbo, dan PHT padi.
 - d. Penguatan modal usahatani.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi gapoktan dalam memberdayakan masyarakat tani yaitu: kurangnya waktu luang petani untuk mengikuti rapat penyuluhan, adanya anggota kelompok yang tidak saling mendukung, lahan yang kurang memadai, masih ada masyarakat yang tidak dapat menerima inovasi yang diberikan karena terkendala masalah geografis, waktu, tenaga, serta modal. kurangnya kualitas bantuan, adanya bantuan racun, irigasi dan alat pertanian yang masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AbdulSyani. 2012. *Sosiologi skematika, teori dan terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Adhy A.K. & Pambudy. 2001: *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Agustang, Andi. 2011. *Filosofi Research Dalam Upaya Pengembangan Ilmu*. Makassar: UNM.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, A & Purwanto. 2010. *Dinamika Kelompok Sosial konsep dan Aplikasi*. Bandung :PT Refika.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung : Rosda Karya.
- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta : Kencana.
- Nasir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rukminto A, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Samsi Hardiani, Sunarru. 2011. *Dinamika Kelompok Teori dan Alikasinya untuk Analisis Keberhasilan Kelmpok Tani sebagai unit Belajar, Kerjasama, Produksi dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.

Santosa, Slamet. 2010. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung : PT Repika Aditama.

Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suparlan, Parsudi. 2008. *Dari Masyarakat Majmuk Menuju Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.

Suharsaputra, Uhar 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: refika Aditama.

Teguh Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Jakarta: Gaya Media.

Torro, S. dkk, 2013. *Kelompok Srategis dalam Masyarakat*. Makassar: Badan Penerbit UNM.

Website

Badan Litbang Pertanian. (2005). *Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2005 – 2025*. Dalam <http://www.Litbang.deptan.go.id/rppk> pada tanggal 13 September 2014 jam 13.00. <http://susiloarisjoko.blogspot.com/2014/01/perilaku-organisasi-implementasi-teori.html> pada tanggal 28 desember 2014 jam 20.30

MERANTAU: STUDI TENTANG FAKTOR PENDORONG DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI TERHADAP AKTIVITAS MERANTAU DI DESA SIJELLING KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE

Oleh:
Agustan

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi munculnya kebiasaan merantau pada masyarakat di Desa Sijelling. 2) Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari aktifitas perantauan pada masyarakat di Desa Sijelling.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penentuan informan dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria seperti: masyarakat yang pernah merantau, kedua masyarakat yang melakukan perantauan dan masyarakat yang di tinggalkan oleh perantau. Adapun yang menjadi informan yaitu masyarakat Desa Sijelling sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data secara konkret yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya aktivitas merantau di Desa Sijelling faktor ketidakbebasan individu, faktor ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal, faktor pendidikan, Adanya kesempatan kerja di daerah tujuan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga. 2) Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap aktivitas merantau Desa Sijelling yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan masyarakat Desa Sijelling dengan meninggalkan kampung halamannya yaitu mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu bergesernya norma adat setempat maupun agama, hal ini terutama terjadi di kalangan muda. Di samping itu budaya matrialistik telah juga menembus daerah asal. Sehingga suatu pekerjaan tadinya merupakan suatu kewajiban sosial, dapat digantikan dengan uang. Tentu saja hal tersebut akan melunturkan budaya gotong royong. Dampak negatif lainnya dapat berupa tenaga kerja daerah asal yang di harapkan dapat mengusahakan lahan pertanian secara optimal semakin berkurang.
Kata Kunci: Merantau, Sosial Ekonomi.

PENDAHULUAN

Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meninggalkan tempat asalnya menuju tempat yang lebih baik dan

dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Hal ini biasa disebut dengan merantau yang merupakan tipe khusus dari migrasi. Menurut Gamawan Fauzi, merantau adalah penjelajahan atau proses hijrah

untuk membangun kehidupan yang lebih baik. (Muarif: 2009 : 52)

Salah satu masyarakat yang terkenal sebagai suku perantau adalah masyarakat Bugis. Budaya rantau atau yang lebih dikenal *sompe'* dalam bahasa Bugis juga sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam jiwa masyarakat Bugis. Karena jiwa rantau itulah, keberadaan mereka bisa dijumpai di seluruh nusantara, bahkan sampai ke luar negeri.

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah Bugis di Sulawesi Selatan, yang penduduknya banyak melakukan aktifitas perantauan. Dengan berbagai alasan mereka meninggalkan kampung halaman. Salah satu wilayah di daerah Bone yang masyarakatnya banyak bermigrasi atau merantau adalah Desa Sijelling yang berada di Kecamatan Tellu Siattinge. Merantau bagi masyarakat Desa Sijelling adalah sebuah aktivitas, dari tahun-tahun sebelumnya, hingga saat ini aktifitas merantau masih banyak digeluti oleh masyarakat di Desa tersebut. Berbagai alasan menjadi motivasi yang mendorong mereka untuk keluar dan meninggalkan kampung halaman.

Salah satu alasan masyarakat Desa Sijelling meninggalkan kampung halamannya adalah karena ingin meningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka. Mereka beranggapan bahwa, keberhasilan tidak bisa dicapai jika hanya berdiam diri tanpa meninggalkan tanah kelahiran. Selain itu, keberhasilan orang-orang terdahulu ditanah rantau, menjadi motivasi tersendiri bagi perantau yang masih pemula.

Selain faktor ekonomi, merantau juga menjadi aktivitas yang dianggap oleh sebagian masyarakat Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge sebagai pembuktian diri akan eksistensi mereka. Apalagi melihat kondisi di Desa Sijelling, yang banyak melakukan perantauan adalah anak muda yang masih mempunyai usia yang produktif yang bahkan baru tamat sekolah dasar. Di usia muda akan menjadikan mereka rentang terpengaruh dengan budaya luar, dan sangat mudah untuk terjerumus pada pergaulan di tempat perantauan.

Pandangan masyarakat ketika mereka berhasil di perantauan akan bersifat positif tapi ketika mereka gagal dalam perantauan tersebut,

masyarakat akan berpikiran negatif. Merantau dengan niat untuk menaikkan derajat keluarga terkadang sebaliknya. Kalau dilihat dengan seksama Desa tersebut masih banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi keluaraga tanpa meninggalkan daerah sendiri. Seperti memperbaiki tata pertanian dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Merantau: Studi Tentang Faktor Pendorong dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Aktivitas Merantau di Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone”.

KERANGKA KONSEPTUAL

Merantau menurut Hamid. (2004: 3), merupakan salah satu pergerakan yang banyak dilakukan oleh etnis Bugis. Bahkan merantau pada etnis Bugis sudah merupakan tradisi yang mendarah daging. Dengan berbagai alasan mereka meninggalkan kampong halaman, implikasi dari aktifitas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa yang banyak merantau adalah kaum muda yang

sebenarnya memiliki potensi kerja yang lebih besar. Oleh sebab itu merantau yang terutama terjadi di pelosok desa di daerah Sulawesi Selatan menjadi sebuah masalah yang mengancam, karena daerah pelosok tersebut akan lebih tertinggal lagi mengingat perhatian pemerintah dan sumber daya manusianya yang produktif justru meninggalakan daerah tersebut.

Merantau berarti migrasi tetapi merantau adalah tipe khusus dari migrasi dengan konotasi budaya tersendiri. Menurut Winstedt, Iskandar, dan Purwadarminta (dalam Naim, 2012: 3) merantau berasal dari kata rantau ialah kata benda yang berarti dataran rendah atau daerah aliran sungai, jadi biasanya terletak dekat ke-atau bagian dari daerah pesisir. Merantau umumnya dilakukan karena berbagai alasan antara lain : harapan yang akan ditemukan hidup lebih baik di daerah rantau, keadaan yang diidam-idamkan selama berada di negri perantauan.

Migrasi diidentikan dengan kata merantau yang sudah di kenal dan di lakukan sejak dulu kala, dimana manusia selalu berpindah dari suatu tempat ketempat lain. Perpindahan ini ada di lakukan

perorangan maupun kelompok (Naim, 2012: 4). Tetapi dari sudut sosiologi, Mochtar Naim (2012) memandang istilah ini sedikitnya mengandung enam unsur pokok diantaranya sebagai berikut:

1. meninggalkan kampung halaman,
2. dengan kemauan sendiri,
3. untuk jangka waktu lama atau tidak,
4. dengan tujuan mencari kehidupan, menuntut ilmu dan mencari pengalaman,
5. biasanya dengan maksud untuk kembali pulang, dan
6. merantau ialah lembaga social yang membudaya.

Menurut Mattulada (1995: 474) dalam bukunya Latoa, pada saat kekuasaan Belanda makin terasa mengurangi kebebasan orang-orang Bugis, sekitar abad XVI hingga abad XIX, terutama dalam hal niaga, maka banyak penduduk Sulawesi Selatan melakukan perpindahan. Mudah sekali bagi mereka untuk pergi sebab, yang merasa terkekang kebebasannya adalah penduduk pesisir pantai yang berkebudayaan maritim dan memiliki perlengkapan mobilitas yang tinggi waktu itu, yakni perahu phinisi. Mereka kemudian merantau ke Malaysia, Sumatera,

Kalimantan, Jawa dan bagian-bagian lain daerah Indonesia.

Ini yang menjadi awal dari perantauan masyarakat Bugis, karena budaya maritim mereka yang gemar mngarungi lautan, dengan berbagai alasan mereka berlayar, awalnya karena alasan kebebasan atau kemerdekaan masyarakat Bugis berlayar (*sompe*) dengan menggunakan perahu phniisi. Namun belakangan muncul berbagai faktor yang melatar belakangi perantauan mereka, dan seiring perkembangan migrasi masyarakat Bugis pun semakin berkembang hingga menjadi tradisi rantau yang mendarah daging.

Adapun dampak yang akan di timbulkan yaitu :

1. Dampak Merantau Terhadap Daerah Asal. Dampak gerak penduduk terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan cultural bukan hanya individu (*mover*), tetapi khusus lagi bagi daerah asal. Bahkan terhadap daerah tujuan pun perlu mendapat perhatian. Karna gejala gerak penduduk sebagai suatu sistem merupakan konsekuensi dari hubungan ketergantungan antara daerah asal dan daerah tujuan.

2. Dampak gerak penduduk tergantung pada sifat dan bentuknya (permanen atau sementara), situasi sosialnya, kondisi ekonomi politik dimana gejala terjadi. Disamping itu tergantung pada jumlah yang terlibat, lamanya tidak ada, pengaruh ketidakadaan dan kemungkinan terjadinya arus pertukaran uang, barang, informasi, ide dan sikap – sikap sangat penting bagi pembangunan pedesaan dan terjadinya perubahan sosial ekonomi menuju masyarakat yang maju. Secara umum Abustam (dalam Akhmad, 2009 :22) mengatakan bahwa:

gerak penduduk pada rumah tangga dan komunitasnya di daerah asal antara lain : menambah pendapatan keluarga, mendorong usaha – usaha pembangunan di desa, mempercepat ide – ide baru, meningkatkan peran wanita, kota sebagai tempat penampungan migran yang akan melanjutkan pendidikankemampuan baca dan tulis, partisipasi ekonomi yang luas pola perilaku yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan sosial - ekonomi pada masyarakat pedesaan.

Naim (2012: 324) megatakan dari sudut pandang ekonomi, merantau juga memperlihatkan

efek positif sekaligus negatif. Bagi banyak orang dengan merantaulah mereka dapat membantu sanak keluarga mereka di kampung dalam bentuk keuangan atau apapun. Tetapi pada waktu yang sama rantau telah menyebabkan pelarian tenaga kerja dan tenaga terdidik, baik dari daerah pedesaan maupun dari daerah perkotaan. Naim (2012).

Ada beberapa dampak sosial budaya yang secara umum terjadi di semua daerah asal perantau yang melakukan perantauan musiman yaitu bergesernya norma adat setempat maupun agama. Hal ini terutama terjadi di kalangan muda. Di samping itu budaya materi telah juga menembus daerah asal. Sehingga suatu pekerjaan tadinya merupakan suatu kewajiban sosial, dapat digantikan dengan uang. Tentu saja hal tersebut akan melunturkan budaya gotong royong. Dampak negatif lainnya dapat berupa tenaga kerja daerah asal yang di diharapkan dapat mengusahakan lahan pertanian secara optimal semakin berkurang. Hal ini

mengakibatkan banyaknya lahan pertanian yang kurang produktif.

3. Dampak Merantau Terhadap Daerah Tujuan. Dampak kegiatan merantau yang melakukan perantau misman dikota/ daerah yang lebih maju. Di daerah tujuan (kota), mobilitas pekerja tidak hanya mempersulit penataan kota, tetapi juga memunculkan kelebihan angkatan kerja, makin meningkat pula laju pertumbuhan penduduk, apabila para perantau tidak mempunyai *skill* atau keahlian dan pendidikan kemungkinan besar akan muncul masalah pengangguran di kota.

Pandangan positif menyatakan bahwa merantau di negara – negara sudah berkembang merupakan salah satu strategi yang tersedia bagi rumah tangga pedesaan, untuk meraih dan menikmati pembangunan yang cenderung menumpuk di kota/ daerah yang lebih maju. Dengan mengalokasikan sumber daya yang ada, rumah tangga pedesaan berusaha memanfaatkan kesempatan yang ada diluar daerahnya.

Hasil kerja di luar daerah kemudian di kirimkan dan di manfaatkan di daerah asalnya.

Menurut Weber tindakan sosial adalah perbuatan manusia yang dilakukan untuk mempengaruhi individu lain di dalam masyarakat. Dengan kata lain, tindakan sosial adalah tindakan yang penuh makna subjektif bagi pelakunya. Tindakan menunjukkan bahwa manusia selalu aktif dalam menjalani hidup, mereka bekerja, belajar dan berhubungan dengan manusia lainnya senantiasa didasarkan pada motif tertentu. (Upe, Ambo : 2010)

Weber membuat klasifikasi mengenai perilaku sosial atau tindakan sosial menjadi empat yaitu:

1. Kelakuan yang diarahkan secara *rasional* kepada tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai kesesuaian antara cara dan tujuan. Contohnya bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup.

2. Kelakuan yang berorientasi kepada *nilai*. Berkaitan dengan nilai – nilai dasar dalam masyarakat, nilai disini seperti keindahan, kemerdekaan, persaudaraan, dll. misalnya ketika kita melihat warga suatu negara yang berasal dari berbagai kalangan berbaaur bersama tanpa membeda-bedakan.
3. Kelakuan yang menerima orientasi dari *perasaan* atau *emosi* atau *Afektif*. contohnya seperti orang yang melampiaskan nafsu mereka.
4. Kelakuan *Tradisional* bisa dikatakan sebagai Tindakan yang tidak memperhitungkan pertimbangan Rasional. Contohnya Berbagai macam upacara \ tradisi yang dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang melatar belakangi munculnya aktivitas

merantau pada masyarakat Desa Sijelling?

2. Bagaimana dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari aktifitas perantauan pada masyarakat Desa Sijelling ?

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan informan penelitian berjumlah 20 informan. menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan bentuk pendekatan studi tentang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tahap Dalam penelitian ini analisis data bersifat deskriptif. Menurut Nasution (Uhar Suharsaputra 2012: 216) analisis data yang dilakukan meliputi pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Teknik pengabsahan data yang dipakai adalah perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

HASIL PENELITIAN

1. Faktor yang Melatar Belakangi Aktivitas Merantau

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa

Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, dan pemaparan dari beberapa informan mengatakan bahwa merantau adalah meninggalkan kampung halaman menuju suatu daerah yang dapat membangun dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Gamawan Fauzi dalam Muarif, merantau adalah penjelajahan atau proses hijrah untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Dari hasil penelitian, beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Sijelling pergi merantau, diantaranya sebagai berikut :

- a) Faktor Ketidak Amanan individu, masyarakat Desa Sijelling yang merasa hidup tidak memuaskan di kampung akibat tindak kekerasan dan kebebasannya di batasi mereka memilih untuk merantau demi memperoleh kehidupan yang lebih aman.
- b) Faktor Ekonomi, masyarakat Desa Sijelling yang kehidupannya susah di kampung memilih untuk merantau mencari rezeki (*sappa dalle*) demi memperbaiki kehidupan ekonominya.

- c) Menyempitnya Lahan Pekerjaan, makin kurangnya lahan untuk dikelola sebagai petani merupakan faktor ketiga yang mendorong masyarakat Sijelling meninggalkan kampung halamannya.
- d) Daya tarik tempat tujuan merantau yang mempunyai peluang untuk melanjutkan pendidikan (*paddisengeng*) kejenjang yang lebih tinggi dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Sijelling dalam melakukan perantauan di atas sesuai pendapat Pelras (2006), yang diceritakan oleh perantau Bugis disebutkan bahwa pada umumnya alasan yang mendasari tindakan mereka meninggalkan kampung halaman adalah berhubungan dengan upaya mencari pemecahan terhadap konflik pribadi, menghindari penghinaan, kondisi yang tidak aman, atau keinginan untuk melepaskan diri baik dari kondisi sosial yang tidak memuaskan, maupun hal-hal yang tidak diinginkan akibat tindak kekerasan yang dilakukan ditempat asal.

Kemudian faktor–faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Sijelling dalam melakukan perantauan diatas sesuai juga menurut Lee (Akhmad 2009) ada empat yang mempengaruhi migrasi yaitu : faktor individu, faktor yang terdapat di daerah asal dengan daerah tujuan dan faktor – faktor rintangan. Akan tetapi faktor yang paling penting adalah faktor individu itu di karenakan faktor inilah yang menilai positif negatifnya suatu daerah.

Dalam teori tindakan Weber, dikatakan Tindakan menunjukkan bahwa manusia selalu aktif dalam menjalani hidup, mereka bekerja, belajar dan berhubungan dengan manusia lainnya senantiasa didasarkan pada motif tertentu, ada sebuah maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dalam setiap tindakannya. Aktivitas merantau di dalam masyarakat Desa Sijelling merupakan salah satu cara yang di lakukan oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf ekonomi keluarga, maka mereka selalu aktif menjalani kehidupan dan meninggalkan kampung halamnya. Selain itu, keberhasilan masyarakat Desa Sijelling terdahulu ditanah

rantau, menjadi motivasi tersendiri bagi perantau yang masih pemula.

Kurangnya lapangan Pekerjaan di Desa Sijelling salah satu menyebabkan masyarakat Desa Sijelling meninggalkan kampung halamannya. Mereka beranggapan bahwa, keberhasilan tidak bisa dicapai jika hanya berdiam diri tanpa meninggalkan tanah kelahiran, sehingga mereka selalu aktif dalam menjalani hidup, mereka bekerja, belajar dan berhubungan dengan manusia lainnya senantiasa didasarkan pada motif tertentu salah satunya meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Hal ini sesuai pendapat Tadoro faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi yaitu faktor ekonomi, seorang yang mempunyai harapan untuk mendapatkan pendapatan lebih tinggi dari pada pendapatan di daerah asalnya. Berdasarkan teori Tadoro dalam Aris Ananta (1993), dapat di simpulkan setidaknya pendapatan seseorang di daerah asalnya merupakan faktor pendorong utama penduduk untuk meninggalkan daerahnya, menuju daerah-daerah lain yang memiliki ekonomi yang lebih baik.

Sesuai dengan pendapat Gamawan Fauzi dalam Muarif (2009), merantau adalah

penjelajahan atau proses hijrah untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Artinya setiap orang menginginkan kehidupan yang lebih layak sehingga mengambil keputusan untuk pergi merantau, jika hal tersebut tidak bisa diperolehnya di kampung halaman maka mereka akan bergerak dan mencari kondisi kehidupan yang lebih baik, pada masyarakat Desa Sijelling mereka merantau dan menuju tempat baru dan memulai kehidupan yang diyakini akan lebih baik dari sebelumnya.

Selain itu dengan adanya daya tarik tempat tujuan dan daya dorong daerah asal sehingga masyarakat Desa Sijelling merantau di beberapa tempat, ini merupakan faktor yang mempengaruhinya masyarakat dalam mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung halamannya dan hal ini sesuai dengan pendapat Lee dalam Ahmad mengemukakan 2 faktor tersebut sebagai penyebab timbulnya migrasi.

a) Faktor Pendorong

1. Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya

makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian.

2. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di wilayah pedesaan yang makin menyempit).
 3. Adanya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku, sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal.
 4. Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan.
 5. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.
- b) Faktor Penarik.
1. Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup.
 2. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
 3. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.
 4. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya

tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar.

2. Dampak Sosial Ekonomi dari Aktifitas Merantau

Merantau bagi masyarakat Bugis di Desa Sijelling merupakan bentuk perwujudan akan hal-hal yang menjadi motivasi mereka. Akan tetapi, jika perantauan tersebut tidak dibarengi dengan keahlian dan tujuan yang jelas, maka akan berdampak buruk bagi yang melakukan perantauan tersebut. Apalagi melihat kondisi di Desa Sijelling, yang banyak melakukan perantauan adalah anak muda yang masih mempunyai usia yang produktif yang bahkan baru tamat sekolah dasar. Di usia muda akan menjadikan mereka rentang terpengaruh dengan budaya luar, dan sangat mudah untuk terjerumus pada pergaulan di tempat perantauan.

Dari hasil wawancara dapat terindikasi bahwa dampak yang dirasakan masyarakat Desa Sijelling dengan meninggalkan kampung halamannya mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga akan tetapi mereka merasakan kurangnya hubungan antara keluarga karna kondisi jarak yang berjauhan.

Tidak bisa di pungkiri bahwa banyak masyarakat Desa Sijelling yang berhasil di rantauan dan kembali di kampung membangun rumah yang lebih modern, membeli sawah dan membangun mesjid. Hal ini sesuai dengan pendapat Abustam yang di jabarkan oleh Akhmad (2009) mengatakan bahwa gerak penduduk pada rumah tangga dan komunitasnya di daerah asal antara lain : menambah pendapatan keluarga, mendorong usaha – usaha pembangunan di desa, mempercepat ide – ide baru, meningkatkan peran wanita, kota sebagai tempat penampungan migran yang akan melanjutkan pendidikan kemampuan baca dan tulis, partisipasi ekonomi yang luas pola perilaku yang pada akhirnya mengakibatkan mengakibatkan perubahan sosial - ekonomi pada masyarakat pedesaan.

Di antara dampak sosial merantau adalah akan berkurangnya tenaga kerja di wilayah pedesaan. Sehingga terjadi kelambatan dalam pola pembangunan. Seperti halnya dengan masyarakat Desa Sijelling, Masyarakat yang cenderung lari ke perkotaan dengan meninggalkan Desa jarang sekali kembali lagi untuk membangun daerahnya,

karena merasa sudah betah hidup di kota, manakala kembalipun ke Desa mereka ada kecanggungan tersendiri, yang biasa mengolah sawah dan bertani mereka cenderung menjadi malas.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat di indikasi bahwa dampak yang di timbulkan dengan aktivitas merantau di Desa Sijelling adalah semakin berkurangnya tenaga kerja di wilayah pedesaan khususnya di kalangan anak mudah karna sudah tidak terbiasa lagi dengan pekerjaan sebagai petani.

Di usia muda akan menjadikan mereka rentang terpengaruh dengan budaya luar dan sangat mudah terjerumus pada pergaulan di tempat perantauan sehingga pada saat kembali ke kampung halaman justru membawa pengaruh buruk bagi pemudah yang lain. Pola pikir anak mudah pada masyarakat Desa Sijelling sekarang sudah terpengaruhi oleh budaya luar. Orang – orang yang dari keluar daerah atau perantau yang kembali kekampung halaman yang membawa budaya luar dan mempengaruhi anak mudah yang ada di Desa Sijelling.

Hal ini terutama terjadi di kalangan muda. Di samping itu

budaya materi telah juga menembus masyarakat Desa Sijelling. Sehingga suatu pekerjaan tadinya merupakan suatu kewajiban sosial, dapat digantikan dengan uang. Tentu saja hal tersebut akan melunturkan budaya gotong royong.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari aktivitas merantau pada masyarakat Desa Sijelling yang telah di paparkan di atas, sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sijelling merantau di beberapa daerah yaitu :
 - a) Faktor ketidak amanan.
 - b) Faktor ekonomi
 - c) Sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal
 - d) Faktor pendidikan
 - e) Adanya kesempatan kerja di daerah tujuan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
2. Dampak social ekonomi yang di timbulkan aktivitas merantau desa sijelling yaitu sebagai berikut: Dampak ekonomi akibat adanya merantau umumnya dapat di katakan positif. masyarakat Desa Sijelling

dengan meninggalkan kampung halamannya mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Masyarakat Desa Sijelling yang berhasil di rantauan dan kembali di kampung membangun rumah yang lebih modern, membeli sawah dan membangun mesjid. Di samping itu ada beberapa dampak sosial budaya yang di timbulkan yaitu bergesernya norma adat setempat maupun agama. Hal ini terutama terjadi di kalangan muda. Di samping itu budaya materi telah juga menembus daerah asal. Sehingga suatu pekerjaan tadinya merupakan suatu kewajiban sosial, dapat digantikan dengan uang. Tentu saja hal tersebut akan melunturkan budaya gotong royong. Dampak negatif lainnya dapat berupa tenaga kerja daerah asal yang di harapkan dapat mengusahakan lahan pertanian secara optimal semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hamid. 1985. *Manusia Bugis Makassar* : Suatu Tinjauan Historis Terhadap
- Pola Tingkah Laku Dan Pandangan Hidup Manusia Bugis. Jakarta : Inti Idayu Press..
- Abustam, Muhammad Idrus & Irwansyah, Idham. 2010. *Komunitas Pedesaan, Budaya Kemiskinan, dan Pendidikan Orang Dewasa*. Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Akhmad, Adnan. 2009. *Pola Migrasi Etnis Jawa Di Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar.
- Ananta, Aris. 1993. *Cirri Demografi Kualitas Penduduk Dampak Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Dwi Narwoko, J. dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta : Kencana.
- Goode, William. 1991. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamid, Abu. 2004. *Passompe Pengembaraan Orang Bugis*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Hamid, Abu. 2009. *Siri' na Pesse'*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Hartini dan G. Kartasapoetra, 1992. *kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spectrum Teori Sosial : Dari Klasik*

- Hingga Postmodern.
Jogjakarta : AR-Ruzz Media.
- Kesuma, Andi Ima. *Moral Ekonomi Manusia Bugis*. Makassar : Rahyan Intermedia.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mannahao, Mustari Idris. 2010. *The Secret Of Siri' Na Pesse'*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Mattulada. 1995. *Latoa : Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Makassar : Hasanuddin University Press.
- Muarif. 2009. *Rahasia Sukses Orang Minang Di Perantauan*. Yogyakarta : Pinus.
- Naim, Mochtar. 2012. *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Perlas, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta : Nalar Bekerja Sama Dengan Forum Jakarta Paris.
- Sugyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Raslina. 2011. *Suku Bangsa dan Bahasa*. PT. Sarana Panca Nusa.
- Ritzer, George 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sugyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Upe, Ambo. 2010. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik Ke Post Positivistik*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sumber Lain :**
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Merantau>
diakses pada 20 April 2014
- <http://sosbud.kompasiana.com/2010/08/24/tradisi-rantau-masyarakat-Bugis-makassar-237385.html>
diakses pada 20 April 2014

PERILAKU MENYIMPANG SANTRI REMAJA PUTRI DI PONDOK PESANTREN DDI LIL-BANAT PAREPARE

Rosita
Hj. Musdalia Mustadjar

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk perilaku menyimpang santri remaja putri dan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh pihak pesantren dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Teori yang digunakan adalah teori sosialisasi, teori perilaku menyimpang, dan kontrol sosial

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Snowball Sampling* dilanjutkan *Purposive Sampling* dengan 6 orang santri dan 2 orang pembina, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perilaku menyimpang santri remaja putri di pondok pesantren ini adalah perilaku melanggar tata tertib pondok seperti mencuri, tidak meminta izin keluar ponpes, tidak mengikuti pengajian dan shalat berjamaah di mesjid. Faktor penyebab perilaku menyimpang yakni ketidakharmonisan keluarga, kebutuhan ekonomi, pola hidup di asrama dan pengaruh dari luar pondok pesantren. Selanjutnya bentuk pengendalian perilaku menyimpang (kontrol sosial) yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren adalah pengendalian preventif dan pengendalian represif.

Kata kunci: Perilaku menyimpang, santri, remaja, putri

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, perkembangan dan kemajuan terjadi di berbagai bidang ilmu, khususnya ilmu teknologi yang mengalami perubahan dan kemajuan ke arah yang lebih berkembang. Informasi saat ini sangat mudah tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk penyebaran nilai-nilai budaya di segala ruang. Jarak dan waktu tidak menjadi masalah lagi, semua terasa dekat dan cepat, hal ini merupakan wujud dari globalisasi yang lahir dari kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi massa.

Di era globalisasi ini, pertukaran ataupun adopsi nilai-nilai budaya saat ini sangat mudah terjadi baik secara keseluruhan maupun secara selektif sehingga menyebabkan terjadinya benturan nilai-nilai budaya antara budaya asli Indonesia dengan budaya dari Barat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya mayoritas menganut ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (manusia religius). Namun saat ini, masyarakat Indonesia khususnya remaja terkadang mengikuti atau mengadopsi budaya barat yang dipelajari melalui media-media teknologi komunikasi massa sehingga memicu terjadinya perilaku remaja yang tidak sesuai dengan budaya maupun ajaran agama yang ada di Indonesia.

Di usia remaja seseorang akan mengalami kegoncangan jiwa, belum memiliki pedoman yang kokoh. Di masa remaja dimana bergejolaknya perasaan yang terkadang saling bertentangan satu sama lain. Gejolak-gejolak ekstrim hampir terlihat disemua remaja. Hal ini sangatlah wajar karena diusia remaja yakni 13-21 tahun mereka memiliki energi dan semangat yang lebih sehingga mereka lebih suka suasana yang ramai, lincah dan berani serta hal itu tersebut didukung dengan kondisi jiwa yang belum stabil sehingga jika tidak dibimbing dengan baik maka mereka dengan mudah menerima budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Arus perkembangan yang begitu pesat menyebabkan kita terjebak oleh budaya sekuler, hal ini karena proses penyebaran informasi dan budaya yang begitu cepat masuk ke seluruh daerah di penjuru dunia, sedangkan nilai budaya yang tersebar terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan berpotensi merusak moral bangsa terutama remaja sebagai penerus bangsa. Mereka sangat rentang terhadap pengaruh budaya bebas yang merusak moral sehingga dibutuhkan bimbingan agama yang dapat dijadikan sebagai salah satu kontrol sosial dalam berperilaku.

Pondok pesantren hadir sebagai salah satu lembaga atau institusi pendidikan khususnya pendidikan agama Islam di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan membentuk moral-moral religius. Pondok pesantren sebagai komunitas khusus atau kelompok yang ideal terutama dalam bidang kehidupan moral atau perilaku dan bahkan pondok pesantren dianggap sebagai tempat mencari ilmu khususnya ilmu agama Islam

dan disertai dengan pengabdian yang sesuai dengan ajaran agama. Mereka selalu berfikir dalam kerangka keagamaan, artinya semua peristiwa yang terjadi dalam struktur relevansinya dengan ajaran agama Islam.

Pondok pesantren tidak hanya mengajarkan atau mendidik santrinya dengan pelajaran-pelajaran umum seperti halnya dengan institusi pendidikan formal yang ada di luar pondok pesantren, akan tetapi di pondok pesantren juga dididik secara moral keagamaan melalui aturan atau norma-norma yang ada di dalam pondok pesantren tersebut yang harus dipatuhi oleh para santri maupun penghuni yang lain, ini membuktikan bahwa inti dari tujuan pondok pesantren itu adalah untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral dan menyiapkan para peserta didik atau santri untuk hidup sederhana.

Keberadaan para santri di pondok pesantren mempunyai latar belakang dan alasan-alasan yang berbeda. Hal ini akan membentuk kualitas diri para santri itu sendiri dalam menyerap nilai-nilai agama Islam. Sebab tidak jarang dijumpai pada suatu pesantren dimana santri yang dititipkan orang tuanya sebagai ketidakmampuan orang tuanya dalam menangani kelakuan buruk anaknya, sehingga memasukkannya ke pondok pesantren. Santri seperti inilah yang terkadang membuat berbagai masalah di lingkungan pondok pesantren.

Pihak pondok pesantren menciptakan peraturan-peraturan agar anggota pondok pesantren berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi pada kenyataannya dalam pondok pesantren Darud Da'wah Wal-Irsyad Lil-Banat Parepare masih dijumpai santri yang berperilaku menyimpang dari norma yang ada.

Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare sebagai salah satu pondok pesantren dan sekaligus sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang memiliki cita-cita meneruskan tongkat estafet perjuangan Nabi. Begitupun idealitas pesantren sebagai benteng pertahanan ajaran-ajaran agama Islam. Di pondok pesantren ini hampir 24 jam santri diberikan pendidikan khususnya pendidikan moral. Santri mulai menjalani aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur kembali di malam hari. Hampir tidak ada waktu untuk melakukan hal yang tidak bernilai pendidikan, namun masih saja terjadi perilaku menyimpang santri yang berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan atau norma yang ada.

Aturan-aturan yang begitu ketat di pondok pesantren ini membuat para santri remaja yang baru mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan pesantren membuat mereka terkadang berperilaku menyimpang dalam hal ini melanggar norma-norma yang ada di pondok pesantren seperti halnya melakukan kekerasan fisik, pencurian, bolos diwaktu jam sekolah formal maupun jam pengajian-pengajian yang diadakan di mesjid dan cara berpenampilan santri yang terkadang mengikuti gaya yang sedang tren dikalangan selebriti, seperti halnya model pakaian yang gaul dan rambut yang berwarna. Belum lagi cara bergaul yang tidak lagi bersikap tawadhu seperti bertutur kata yang kasar, suka urakan dan rendahnya sikap menghormati. Etika non-religius seperti itu telah ditelan mentah-mentah tanpa disikapi secara kritis. Identitas santri sedikit demi sedikit mulai terkikis seiring perkembangan waktu, lebih-lebih pada santri remaja yang terkadang tidak dapat mengontrol diri dari pengaruh yang ada di luar pondok pesantren.

Kerangka Konseptual

Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat atau dalam kelompok tertentu disebut sebagai perilaku menyimpang. Perilaku seperti ini terjadi karena seseorang mengabaikan norma-norma atau tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat sehingga sering dikaitkan dengan istilah-istilah negatif. Menurut James vander Zanden (Sunarto, 2004: 179) penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi dan Becker (Horton, 1999: 191) menerangkan bahwa “menyimpang bukanlah kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan orang, melainkan konsekuensi dari adanya aturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap pelaku tindakan tersebut, dan Henslin (2007: 148) menjelaskan bahwa penggunaan istilah penyimpangan (*deviance*) oleh para sosiolog merujuk pada semua pelanggaran peraturan sosial, terlepas dari tingkat keseriusannya. Istilahnya bersifat netral, bukan suatu penilaian terhadap perilaku. Penyimpangan bersifat negatif, karena apa yang merupakan penyimpangan dalam suatu kelompok dapat merupakan konformitas dalam kelompok lain. Sebagai konsekuensinya, kita harus memandang penyimpangan dari dalam kerangka berpikir kelompok itu sendiri, karena makna merekalah yang mendasari perilaku mereka.

Perilaku yang digolongkan sebagai menyimpang menurut Narwoko dan Bagong Suyanto (2007: 101) secara umum perilaku yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang yakni (1) Tindakan yang *nonconform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. (2) Tindakan yang antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. (3) Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain.

Hal ini yang terjadi di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare dimana santrinya mengalami kemerosotan moral dan etika non-religius yang diadopsi dikalangan santri terkhusus santri remaja menjadi fenomena objektif dalam kehidupan pesantren yang notabene adalah wadah untuk membentuk moral yang lebih religius. Hal ini seharusnya mampu dimaknai sebagai gejala sosialisasi dari luar pesantren dalam membentuk perilaku santri atau proses sosial santri yang belum tentu sesuai dengan aturan pesantren atau bahkan aturan agama. Robert M. Z. Lawang (Setiadi, 2011: 156), menurutnya sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Namun proses sosialisasi yang tidak sempurna dapat menyebabkan seseorang dapat berperilaku tidak sesuai kaidah yang ada.

Berperilaku yang tidak sesuai dengan agama, dikarenakan santri yang seharusnya adalah orang yang mampu bertindak secara religius sesuai dengan syariat dalam berperilaku justru sebaliknya terpengaruh dengan perilaku teman-teman sebayanya yang ada di luar pondok pesantren.

Dalam dunia remaja itu sendiri dewasa ini telah dihadapkan pada suatu zaman kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, sosial dan kebudayaan dan hampir diseluruh bidang terjadi perkembangan atau dapat dikatakan remaja saat ini telah berada di zaman modern. Masa remaja memang merupakan puncak dari kenakalan yang dilakukan manusia semasa hidupnya. Kenakalan tetaplah kenakalan, dan ini disebabkan karena keisengan remaja, gengsi yang tinggi dan rasa ingin tahu yang berlebihan. Dengan melihat permasalahan yang ada di pondok pesantren khususnya Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare, dimana para santri bebas mengakses media-media social yang memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap perilaku santri maupun karakter santri,

sehingga semua pihak perlu memaksimalkan kontrol sosial agar para remaja khususnya santri tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Media massa dalam hal ini media sosial merupakan media sosialisasi yang kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang ada. Bahkan proses sosialisasi melalui media massa ruang lingkungannya lebih luas dari media sosialisasi lainnya. Iklan-iklan yang ditayangkan media massa misalnya disinyalir telah menyebabkan terjadinya perubahan pola konsumsi, bahkan gaya hidup warga masyarakat. Tayangan adegan kekerasan dan adegan-adegan yang menjurus ke pornografi, ditenggarai juga telah banyak berperan menyulur perilaku agresif remaja, dan menyebabkan terjadinya pergeseran moral pergaulan, serta meningkatkan terjadinya berbagai pelanggaran norma susila (Narwoko, 2012: 96).

Kontrol sosial di masyarakat ataupun pihak pondok pesantren menjadi salah satu cara untuk mencegah ataupun menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang karena kontrol sosial menurut Soekanto (2012: 179) sering diartikan sebagai pengawasan sosial oleh masyarakat mencakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Kontrol sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: (1) Cara pengendalian sosial melalui institusi dan non-institusi, (2) Pengendalian secara lisan, simbolik dan kekerasan, (3) Pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman (*reward and punishment*), (4) Cara pengendalian sosial formal dan informal, (5) Cara pengendalian sosial formal dan informal, (6) Pengendalian sosial melalui sosialisasi, (7) Cara pengendalian sosial melalui tekanan (Syarbaini, 2009: 93-96).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana gambaran bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh santri remaja putri di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare ?
2. Bagaimana upaya pengurus pondok pesantren dalam menanggulangi perilaku menyimpang yang dilakukan santri remaja putri di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui gambaran bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh santri remaja putri di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare
2. Mengetahui upaya pengurus pondok pesantren dalam menanggulangi perilaku menyimpang yang dilakukan santri remaja putri di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi sasaran penelitian adalah santri remaja putri yang berumur 12-17 tahun serta guru dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Snowball Sampling* dilanjutkan *Purposive Sampling* dengan 6 orang santri sebagai informan dan 2 orang pembina sebagai informan kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi serta yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan ditunjang dengan beberapa instrumen pendukung seperti *tape recorder*, kamera dan buku catatan serta pedoman wawancara. Selanjutnya analisis data dengan jenis deskriptif yang dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga sosial yang bergerak di bidang keagamaan sehingga banyak masyarakat yang memilih melanjutkan pendidikan anaknya di pondok pesantren termasuk pondok pesantren DDI Lil-Banat Parepare dengan harapan anak-anak mereka akan tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai agama.

1. Bentuk Perilaku Menyimpang Santri Remaja Putri di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare

Perilaku menyimpang dalam konteks sosiologi merujuk pada semua pelanggaran peraturan sosial, terlepas dari tingkat keseriusannya. Penyimpangan bukan suatu penilaian terhadap perilaku karena sifatnya relatif karena apa yang merupakan penyimpangan dalam suatu kelompok dapat merupakan konformitas dalam kelompok lain, sebagai konsekuensinya

kita harus memandang penyimpangan dalam kerangka berpikir kelompok itu sendiri, karena makna merekalah yang mendasari perilaku mereka. (Henslin, 2007: 151). Di pondok pesantren para pengurus pondok telah membuat peraturan tata tertib pondok yang wajib ditaati para santri, ada 9 peraturan tata tertib pondok: (1) Wajib mengikuti shalat berjamaah di mesjid, (2) Wajib mengikuti proses belajar di sekolah dan di mesjid, (3) wajib mengikuti training dakwah, (4) Wajib menjaga tali persaudaraan, (5) Wajib mengikuti apel pagi, (6) Wajib meminta izin sebelum keluar dari lingkungan pondok pesantren, (7) Tidak boleh membuat keributan, (8) Wajib menjaga kebersihan Pondok pesantren, (9) wajib mengikuti semua kegiatan pondok pesantren. Dari tata tertib yang ada muncullah perilaku menyimpang yang dilakukan para santri remaja putri yang ada di pondok pesantren DDI Lil-Banat Parepare, jika orang yang berada di luar pondok pesantren melihat bahwa santri yang tidak mengikuti shalat berjamaah di mesjid bukanlah hal yang menyimpang namun, di pondok pesantren hal tersebut disebut menyimpang karena telah melanggar tata tertib pondok pesantren. Dari hasil observasi dan wawancara, berikut bentuk perilaku menyimpang santri remaja putri yang di ungkapkan oleh informan yang telah diwawancarai yakni melakukan pelanggaran terhadap aturan atau norma yang berlaku di pondok pesantren. Hasil temuan, yang dilakukan selama tahun 2013-2014 ada 26 santri putri yang melakukan pelanggaran bentuk pelanggaran tata tertib pondok pesantren yaitu tidak mengikuti pengajian di mesjid, tidak ikut shalat berjamaah di mesjid, tidak ikut training dakwah pada malam jum'at, tidak meminta izin pada waktu keluar dari lingkungan pondok pesantren, membuat keributan dengan mengganggu santri putri yang lain, kencan/pacaran, di tambah lagi dengan pencurian yang dilakukan oleh santri remaja putri. Dari pelanggaran tersebut yang paling sering dilanggar adalah tidak mengikuti shalat berjamaah dan tidak meminta izin pada saat mau meninggalkan lingkungan pondok pesantren.

Penyimpangan perilaku dari yang sudah di atur oleh peraturan pondok pesantren DDI Lil-Banat Parepare tersebut di karenakan faktor lingkungan dalam hal ini sistem asrama atau pola hidup di asrama. Pola hidup yang dijalani berbeda dengan pola hidup sebelum mondok, jadi para santri butuh adaptasi dengan lingkungan yang diterapkan pondok pesantren. Selain itu

alasan santri melakukan perilaku menyimpang di karenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, pelampiasan rasa kecewa, ketidaknyamanan hidup di pondok pesantren yang penuh dengan peraturan, dorongan kebutuhan ekonomi. Kesemua faktot tersebut sama halnya yang disebutkan Eilly M. Setiadi (2011: 215-227) tentang sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang yakni (1) Sikap mental yang tidak sehat, (2) Ketidakharmonisan dalam keluarga, (3) Pelampiasan rasa kecewa, (4) Dorongan kebutuhan ekonomi, (5) Pengaruh lingkungan dan media massa, (6) Keinginan untuk dipuji, (7) Proses belajar yang menyimpang, (8) Ketidaksanggupan menyerap norma, (9) Proses sosialisai nilai-nilai subkultur menyimpang, (10) Kegagalan dalam proses sosialisasi, (11) Adanya ikatan sosial yang berlainan.

2. Penanggulangan Perilaku Menyimpang Santri Putri di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare (Kontrol Sosial)

Dari hasil penelitian ini malalui wawancara dan observasi terlihat bahwa Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare ini memiliki peraturan untuk para santri, dimana peraturan ini diharapkan mampu menjadi alat kendali para santri dalam berperilaku. Peraturan yang ini mengarahkan para snatri agar berperilaku layaknya orang-orang yang patuh kepada ajaran agama khususnya agama Islam. Dengan melihat hasil wawancara dengan salah satu pembina pondok pesantren terlihat bahwa pihak pondok pesantren menerapkan sifat pengendalian sosial preventif dan Pengendalian Refresif (Setiadi, 2011:255-256). Preventif yakni segala bentuk pengendalian sosial yang berupa pencegahan atas perilaku menyimpang (*deviation*) agar dalam kehidupan sosial tetap kondusif (konformis), misalnya pihak pondok pesantren melakukan pembinaan melalui pengkajian dan penghayatan kitab-kitab kuning dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, selain itu pihak pondok pesantren memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa mengasa kretivitas santri di pondok pesantren salah satunya dengan penyelenggaraan training dakwa pada malam jum'at. Sedangkan represif adalah bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kekacauan sosial atau mengembalikan situasi deviasi menjadi keadaan kondusif kembali (konfromis), seperti di pondok pesantren ini pihak pondok memberikan sanksi kepada santri yang melakukan pelanggaran atau

berperilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran pondok pesantren.

Sanksi sebagai sarana kontrol sosial, ada tiga sanksi yang digunakan di dalam usaha menciptakan tertib sosial diantaranya (1) sanksi fisik, (2) Sanksi psikologis, (3) Sanksi ekonomi (Setiadi: 2011: 257), hal inilah yang diterapkan di pondok pesantren DDI Lil-Banat Parepare, dimana para santri yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa; (1) sanksi fisik yaitu di jemur di panas matahari, membersihkan lingkungan pondok pesantren baik asrama maupun sekolah, membaca al-qur'an, menghafal hadits. (2) Sanksi psikologis yaitu *drop out* (DO) atau di dikeluarkan dari pondok pesantren, selain itu ada beberapa guru yang menerapkan sanksi ini dengan memasukkan foto santri yang melanggar ke media sosial, Namun, untuk sanksi DO sebelumnya dilakukan pengendalian secara represif melalui tiga tahap yakni berupa teguran atau nasehat, diberi peringatan, dan kemudian dikeluarkan atau DO jika tidak ada perubahan penyimpangan perilaku yang dilakukan. (3) Sanksi ekonomi yaitu santri yang melanggar kadangkala di denda dengan nominal tertentu, seperti jika santri tidak ikut training dakwah pada malam jum'at.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Sebagai hasil penelitian tentang perilaku menyimpang santri remaja putri di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang umumnya dilakukan beberapa santri pondok pesantren adalah pelanggaran tata tertib pondok pesantren, seperti tidak mengikuti pengajian di mesjid, tidak ikut shalat berjamaah di mesjid, tidak ikut training dakwah pada malam jum'at, tidak meminta izin pada waktu keluar dari lingkungan pondok pesantren, membuat keributan dengan mengganggu santri putri yang lain, kencan/ pacaran, di tambah lagi dengan pencurian yang dilakukan oleh santri remaja putri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakharmonisan keluarga, pola hidup di

lingkungan pesantren, kebutuhan ekonomi dan pengaruh dari luar pondok pesantren.

2. Upaya penanggulangan perilaku menyimpang santri remaja putri (kontrol sosial) di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare yakni dengan cara preventif dan represif, dimana pengendalian yang bersifat preventif yakni pihak pondok pesantren melakukan pembinaan melalui pengkajian dan penghayatan kitab-kitab kuning dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sedangkan pengendalian yang bersifat represif yakni memberikan hukuman atau sanksi kepada santri yang melanggar. Adapun bentuk sanksi yang diterapkan di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare berupa sanksi fisik yaitu di jemur di panas matahari, membersihkan lingkungan pondok pesantren, membaca Al-Qur'an, dan menghafal hadits. Sanksi psikologis yaitu *droup out* (DO) dan memasukkan foto santri yang melanggar ke media sosial dan sanksi ekonomik yaitu didenda dengan nominal tertentu. Ketiga sanksi tersebut diharapkan dapat membuat jera para santri yang melakukan perilaku menyimpang sehingga perilaku tersebut tidak lagi terulang.

Implikasi

Adapun implikasi akan hal ini, membawa pemahaman tentang perilaku menyimpang yang tidak hanya dipahami sebagai perilaku yang perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial akan tetapi perilaku menyimpang tidak dapat digeneralisasikan melainkan dipandang dari pola pikir kelompok dimana individu itu berada.

Perilaku menyimpang ditinjau dari faktor sosiologisnya menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang yang kaitannya dengan sosialisasi yang tidak sempurna. Untuk mengendalikan perilaku menyimpang diperlukan kontrol sosial atau pengawasan sosial dari semua pihak agar perilaku menyimpang dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1993. *SOSIOLOGI: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agussalim, A. M. 2011. *Analisis Patologi Sosial dalam Perspektif Multidimensi Penyimpangan Sosial*. Makassar: Lembaga Penerbit UNM.
- Darajat, Zakiyah. 1991. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Damopololii, Muljono. 2011. *Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern*. Jakarta: Rajawali Pers
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Gunarsa, Siggih D. 1988. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Haq, Hamkah. 2009. *Islam Rahmah untuk Bangsa*. Jakarta: RMBOOKS PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Henslin, James M. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga
- Horton, B. Paul dan Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mujib, Abdul. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexi J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Nafi', M. Dian dkk. 2007. *Praksis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: Forum Pesantren.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana. Jakarta.
- Nasution, S. 2009. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-3. Bandung: Alfabeta
- Setiadi, Elly M. Dan Usman Kolip. 2011. *PENGANTAR SOSIOLOGI; Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers

- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Kumanto. 2004. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syarbaini, Syahrial dan Rusdiyanta. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Gsraha Ilmu.

**SISTEM PATRIARKI DALAM MASYARAKAT BALI (STUDI KASUS DI DESA
KERTORAHARJO KECAMATAN TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Ulfa Utami Mapped

**Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar**

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui, (1) sistem patriarki dalam masyarakat, (2) subordinasi terhadap perempuan yang tetap dipertahankan oleh masyarakat migran Bali di desa Kertoraharjo kecamatan Tomoni Timur kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) perempuan dan laki-laki ditempatkan dalam posisi yang berbeda di dalam masyarakat. Laki-laki dianggap lebih dari perempuan, dimana perempuan harus melahirkan anak laki-laki, harus mengikuti kata suami, harus tunduk pada ketentuan adat tanpa protes dan cukup dengan menyesuaikan diri mereka saja, tidak berhak atas harta orang tua mereka, bila terjadi perceraian maka tidak berhak atas hak asuh anak sebagaimana ia tidak memiliki garis kekeluargaan, berperan ganda sebagai ibu dan pencari nafkah. Sedangkan laki-laki berada pada posisi sebaliknya. Laki-laki dan perempuan terkungkung dalam aturan-aturan adat yang bisa dikatakan lebih menguntungkan bagi laki-laki dan menempatkan perempuan pada keadaan termarginalkan, tersubordinat, distreotip lemah, mengalami kekerasan, serta berperan ganda. (2) Subordinasi terhadap perempuan atau dalam hal ini budaya patriarki tetap dilanggengkan karena hal ini sudah dilakukan secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Apabila hal ini diubah maka sama arinya dengan mengubah tatanan. Hal ini dianggap tidak seseuai dengan ajaran agama Hindu dan saat ini pihak-pihak keagamaan mencoba untuk memperbaikinya.

Kemajuan zaman memberikan sedikit perubahan pola pikir bagi sebagian masyarakat Bali bahwa anak perempuan ternyata begitu termarginalkan, maka mereka diberikan bekal pendidikan sebagai harta yang akan mereka bawa keluar dari rumah, tapi hak atas harta bahkan sebagian besar tidak bisa memberikan jawaban secara gamblang bahwa mereka adalah orang tua yang telah berpikir berbeda dari nenek moyang mereka dan akan memberikan hak yang sama kepada anak perempuannya.

Kata kunci : patriarki, subordinasi

PENDAHULUAN

Mobilitas suatu
masyarakat dari suatu tempat ke

tempat yang lain adalah suatu hal yang lumrah dalam masyarakat Indonesia. Misalnya masyarakat suku Bali di Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni

Timur Kabupaten Luwu Timur. Perpindahan ini tentu saja membawa budaya dari daerah asal, salah satunya adalah bagaimana posisi perempuan dan laki-laki dalam hukum adat bali, keluarga dan rana publik.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinansi atau anggapan tidak penting

dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideology nilai peran gender (Mansour Fakhri, 2013 : 12).

Dalam budaya masyarakat Bali, perempuan diposisikan subordinat terhadap laki-laki. Perempuan dinomorduakan dalam masyarakat Bali dan sangat sedikit perannya untuk beraktualisasi diruang-ruang publik. Kedudukan perempuan sebagai makhluk nomor dua paling nampak dalam keluarga yang masih memegang teguh adat mereka.

Salah satu yang paling nampak dari budaya patriarki didalam masyarakat Bali yakni hukum waris. Apabila didalam satu keluarga memiliki anak perempuan dan anak laki-laki, maka anak laki-laki sajalah yang berhak untuk menjadi ahli waris. Sedangkan anak perempuan apabila telah menikah, maka akan keluar dari rumah,

sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami, dan tidak berhak atas harta orang tua.

Dalam pandangan awam, perempuan Bali adalah mahluk dengan etos kerja yang tinggi, dapat menjadi pencari nafkah, dan dapat sepenuhnya menjadi perempuan sebagaimana kodratnya. Tapi dibalik keuletan perempuan Bali ini tersimpan ketidakadilan gender, dimana mereka dimiskinkan, dimarginalisasikan, dan diharuskan untuk menjadi perempuan dengan peran ganda agar oleh warisan budaya patriarki yang dilanggengkan.

Yang menarik dari penelitian ini adalah masyarakat di desa Kertoraharjo adalah masyarakat migran. Akan tetapi, migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Bali dari pulau Bali ke Sulawesi Selatan di desa Kertoraharjo tidak serta merta merubah hukum adat yang mendiskriminasi perempuan ini. Ditempat baru hukum ini tetap diberlakukan sebagai hal yang memang harus diterima oleh perempuan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem patriarki dalam masyarakat Bali di desa Kertoraharjo kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur?
2. Mengapa subordinasi terhadap perempuan masih tetap dipertahankan dalam masyarakat migran Bali di Desa Kertoraharjo kecamatan Tomoni Timur kabupaten Luwu Timur?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sistem patriarki dalam masyarakat Bali di desa Kertoraharjo kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur
2. Untuk mengetahui subordinasi terhadap perempuan yang tetap dipertahankan oleh masyarakat migran bali di desa Kertoraharjo kecamatan Tomoni Timur kabupaten Luwu Timur

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka pikir berdasarkan pada manifestasi ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih (2013: 12) sebagai berikut :

- 1) Marginalisasi Perempuan
Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu

serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi ditempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, atau kultur dan Negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak dirumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak diantara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan member hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.

2) Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan

bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Dalam rumah tangga jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan menyekolahkan anak-anaknya makan anak laki-laki yang akan mendapatkan prioritas utama.

3) Pelabelan (*stereotype*)

Secara umum *stereotype* adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Salah satu jenis *stereotype* berasal dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (*stereotype*) yang dilekatkan pada mereka.

4) Kekerasan (*violence*)

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap

satu jenis kelamin tertentu diakibatkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya kekerasan disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

5) Beban Kerja

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan dimasyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis 'pekerjaan perempuan', seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai 'pekerjaan lelaki', serta serta dikategorikan 'bukan produktif' sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi Negara. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan gender ini, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Dilain pihak lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk

menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik itu. Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Pendekatan yang dimaksud untuk mengetahui sistem patriarki dalam masyarakat perkampungan Bali di Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam setiap agama tentu saja ajaran-ajaran kebaikan adalah hal yang menjadi niscaya. Akan tetapi budaya-budaya dalam masyarakat juga adalah salah satu kebutuhan bahkan terkadang pula bertentangan

dengan ajaran agama yang dijalankan.

Namun, ada adat dan budaya masyarakat yang bertolak belakang dengan agama yang dipercayainya. Salah satunya adalah masyarakat Bali yang menganut agama Hindu. Sistem patriarki dalam adat masyarakat Bali tidak diajarkan dalam kitab Wedah sebagai pegangan umat Hindu.

Masyarakat Bali mulai bertransmigrasi dari pulau Bali ke desa Kertoraharjo pada tahun 1971 pada saat itu zaman pemerintahan Orde Baru yang menyelenggarakan program transmigrasi dari pulau-pulau padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya. Sulawesi selatan salah satunya adalah pula tujuan untuk para transmigran tersebut.

Transmigrasi yang dilakukan masyarakat bahkan perubahan zaman yang semakin modern tidak serta merta dapat merubah kondisi ini. Sikap tidak setuju dari perempuan terhadap aturan adat dan budaya patriarki yang dilanggengkan tidak jarang

terdengar, akan tetapi tetap saja keadaan ini bukanlah hal yang mudah untuk diubah.

Pada sebagian besar masyarakat Indonesia patrilineal adalah cara untuk menarik garis keturunan. Akan tetapi ada yang berbeda dan terkesan unik dalam adat istiadat masyarakat Bali sejak dari nenek moyang mereka hingga saat ini. Dalam kondisi demikian, Ivan Illich (2007: 67) mengatakan tiap budaya memberi tugas-tugas yang berlainan pada lelaki dan pada perempuan ketika budaya itu menjunjung masa silamnya.

Dari hasil penelitian penulis menerima pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki memang berada pada posisi yang berbeda, baik pengakuan dari perempuan maupun laki-laki. Sekalipun ada beberapa orang informan yang menjawab tidak akan tetapi pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya seolah-olah mereka juga menggambarkan bahwa memang benar adanya perempuan dalam masyarakat Bali dinomorduakan.

Keluarga adalah lingkungan awal dimana masyarakat berinteraksi dengan kondisi sosial. Keluarga mengenalkan terhadap anak bagaimana aturan-aturan yang mengatur mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam kondisi ini masyarakat diatur bagaimana menjadi bagian dari adat dan kebudayaan yang dijalani oleh masyarakatnya secara turun-temurun. Seperti yang dikatakan Jhonson (Ritzer dan Goodman, 2004 : 409), asal usul ketimpangan gender dari dalam keluarga patriarki ditemukan hampir diseluruh masyarakat. Keluarga mempunyai fungsi yang berbeda dari lembaga sosial, ekonomi, politik, dan lembaga publik lainnya. Keluarga menyosialisasikan anak-anak dan mempengaruhi emosi anggota-anggotanya, keluarga berperan dalam memperkuat ikatan sosial dan menghasilkan nilai (interaksi dan pemeliharaan tindakan).

Pembentukan mental yang mengenalkan budaya patriarki sejak awal menjadikan

perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Bali sadar akan penempatan diri mereka sejak kecil. Setelah beranjak remaja dan lebih dewasa laki-laki bahkan menyadari apa yang menjadi warisannya dan perempuan menyadari bagaimana dirinya adalah anak orang lain.

Permasalahan

selanjutnya yaitu laki-laki dan perempuan Bali dalam adat mendapatkan posisi yang juga berbeda, misalnya dalam rapat adat laki-laki sajalah yang ikut dalam rapat sedangkan perempuan bertugas untuk menyiapkan konsumsi. Dalam rapat adat ini laki-laki memiliki hak berbicara dan mengambil keputusan sedangkan perempuan hanya perlu menyesuaikan diri dan mengikuti keputusan adat.

Keberadaan perempuan dan laki-laki dalam adat masyarakat Bali sangat jelas terlihat sebagaimana sistem patriarki yang berlaku sesuai aturan adat dan mempengaruhi hingga ke praktek-praktek dalam

keagamaan yang sebenarnya hal tersebut hanyalah budaya. Pada pembagian tugas dalam upacara-upacara keagamaan misalnya masyarakat Bali menempatkan perempuan dalam posisi dengan pekerjaan yang lebih berat, yakni membuat sajen hingga isi-isiannya mulai dari bunga hingga makanan-makanan, megaturnya, dan akhirnya laki-lakilah yang menaikkannya ke tempat persebahunyangan sedangkan laki-laki hanya menyiapkan bahan mentah saja.

Posisi perempuan dan laki-laki dalam keluarga masyarakat Bali juga terjadi ketimpangan dimana laki-laki sebagai kepala keluarga, pengatur keluarga, serta pencari nafkah. Sedangkan perempuan adalah ibu rumah tangga, pengurus keluarga, pengurus anak akan tetapi juga pencari nafkah yang sama tanggunya dengan laki-laki. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa perempuan dalam masyarakat Bali memiliki peran ganda, sebagai ibu dan pencari nafkah.

Melihat hal ini tentu saja sangat miris ketika harus dibenturkan dengan hak-hak yang didapatkan perempuan. Dimulai dari keluarga inti, perempuan bahkan tidak memiliki hak atas kekeluargaan orang tuanya, mereka justru bertanggung jawab untuk menjalankan leluhur suaminya setelah menikah kelak. Laki-laki disadarkan mengenai bagaimana tanggung jawab mereka atas garis kekeluargaan keluarganya yang dijaganya dan dijalankannya.

Tuntutan lain yang lebih ekstrim adalah dalam masyarakat Bali perempuan dituntut untuk melahirkan anak laki-laki untuk menjadi penerus kekeluargaan keluarga ayahnya, sedangkan anak perempuan hanya dijadikan sebagai anak nomor dua sebagai anak orang lain, merawat anak perempuan bagi masyarakat Bali layaknya kata pepatah "seperti merawat bunga untuk taman orang lain".

Perempuan dan laki-laki adalah dalam kehidupan sosial dan keluarga saling

mebutuhkan, salah satunya tentu saja tidak bisa hidup tanpa yang lain. Namun, perempuan dalam masyarakat Bali diperlakukan subordinat yang keberadaannya tidak begitu penting dalam sebagian hal. Terlihat dari bagaimana suatu keluarga begitu mengharapkan kehadiran anak laki-laki bahkan apabila seorang ibu tidak memiliki anak laki-laki maka hal itu merupakan penyesalan besar sedangkan hal tersebut merupakan takdir.

Jalan bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki adalah melakukan *sentano* yaitu mengangkat anak laki-laki. Atau dengan kata lain laki-laki dipinang oleh perempuan untuk menjadi suami berstatus istri, dimana laki-laki meninggalkan kekeluhuran keluarganya dan ikut dengan kekeluhuran istrinya. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memberikan warisan kepada perempuan sebenarnya tidak ada kepercayaan, walaupun sebenarnya perempuan berhak atas harta orang tuanya karena tidak memiliki saudara laki-laki akan

tetapi masih saja mereka harus mengubah statusnya menjadi laki-laki.

Deere dan Leal (1981 dalam Jane dan Hellen 2002: 166) mengatakan bahwa baik laki-laki maupun wanita umumnya menganggap tugas-tugas yang dipikul wanita jauh kurang penting. Hal ini dapat terlihat dalam masyarakat Bali dimana peraturan adat seolah-olah tidak memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk menjadi pengurus sanggah, pengurus orang tuanya, yang lebih ekstrem bahkan perempuan dikesampingkan dalam urusan akhirat dimana kepercayaan mereka bahwa anak laki-lakilah yang kelak menyebrangkan orang tuanya ke surga, akan tetapi bukankah jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama maka tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang sama. Sedangkan dalam agama Hindu posisi perempuan dan laki-laki adalah sama dan tidak ada ketentuan mengenai sistem patriarki, hal ini menunjukkan

bagaimana agama dan adat umat Hindu Bali sangat bertolak belakang.

Selain permasalahan diatas perceraian adalah ancaman terbesar bagi perempuan. Sesuai hukum yang berlaku harta yang didapatkan bersama selama menjalani pernikahan adalah harta yang harus dibagi dua, akan tetapi pada kenyataannya perempuan yang telah mengalami perceraian mengaku tidak membawa apa-apa dari rumah mereka. Sekalipun telah bekerja keras akan tetapi harta tersebut kadang tidak terlihat karena habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Masalah selanjutnya bagi perempuan yang mengalami perceraian yaitu selain mereka tidak diberi bekal saat keluar dari rumah, mereka juga tidak berhak atas hak asuh anak apalagi apabila anak tersebut laki-laki. Jika ingin merawat maka perempuan boleh merawat hingga dewasa setelah itu dikembalikan kepada ayahnya sesuai garis keturunan dan keleluhurannya.

Hukum waris adalah bias dari perbedaan jenis kelamin yang paling terlihat. Perempuan tidak diberikan harta sedangkan semua harta orang tua laki-laki yang berhak. Apabila ada 5 orang bersaudara, yang 4 adalah perempuan dan yang 1 adalah laki-laki maka yang disekolahkan pasti adalah laki-laki. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perempuan dimarginalkan dan tidak diberikan hak yang sama dengan laki-laki, laki-laki berhak atas harta bahkan pendidikan sedangkan perempuan tidak dalam kondisi-kondisi tertentu.

Menerima kenyataan ini perempuan menginterpretasikan diri sebagai sosok yang kuat. Mereka tetap menjalani tututan nilai-nilai yang menempatkan diri mereka kedalam posisi yang disubordinat. Keadaan di mana perempuan sebenarnya adalah sosok yang tegar dan mampu menghasilkan apa yang menjadi tuntutan untuk mereka.

Hal-hal di atas tentu saja menjadi masalah bagi perempuan walaupun hanya menjadi sebatas konflik batin

saja sekalipun telah disadari oleh laki-laki. Hal ini serupa dengan teori fungsionalisme Talcot Parson (Parson, 1951 dalam Musdaliah 2013), harmoni dan stabilitas suatu keluarga sangat ditentukan oleh efektivitas konsensus nilai. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) dalam prospektif gender. Meskipun konflik sewaktu waktu dapat muncul, tetapi masih dalam batas wajar dan bukan merupakan ancaman yang bakal merusak sistem keluarga yang mengakui adanya prospektif gender.

Tidak ada keterangan tersurat maupun tersirat mengenai budaya patriarki yang dijalankan sesuai adat saat ini dalam masyarakat kitab Wedah. Misalnya, permasalahan harta warisan secara adat bahwa perempuan tidak mendapatkan harta. Yang ada hanyalah bagaimana posisi-posisi perempuan dan laki-laki misalnya laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi keluarga sedangkan perempuan tidak

memiliki kewajiban tersebut. Dalam kitab Wedah setiap anak perempuan ataupun laki-laki mempunyai hak yang sama tanpa dibedakan. Bagaimana hak laki-laki dan perempuan yang dijalankan saat ini merupakan praktek adat bukanlah agama. Hal inilah yang saat ini sedang berusaha diperbaiki oleh pihak-pihak lembaga keagamaan yang mulai ditanamkan melalui pemudanya.

Kemajuan zaman memberikan sedikit perubahan pola pikir bagi sebagian masyarakat Bali bahwa anak perempuan ternyata begitu termarginalkan, maka mereka diberikan bekal pendidikan sebagai harta yang akan mereka bawa keluar dari rumah, tapi hak atas harta bahkan sebagian besar tidak bisa memberikan jawaban secara gamblang bahwa mereka adalah orang tua yang telah berpikir berbeda dari nenek moyang mereka dan akan memberikan hak yang sama kepada anak perempuannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transmigrasi yang terjadi sejak tahun 1971 oleh masyarakat asli pulau Bali ke Sulawesi Selatan tepatnya di Desa Kertoraharjo kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur ternyata tidak bisa mengubah bagaimana perempuan dan laki-laki diatur dalam tatanan adat sejak nenek moyang mereka. Hal ini terbukti sebagaimana terlihat setelah 43 tahun meninggalkan kampung halamannya, bahkan orang tua mereka yang paling pertama bertransmigrasi ke desa ini mungkin telah meninggal dunia tapi tetap saja aturan ini masih tetap dijaga dan dijalankan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perempuan dan laki-laki ditempatkan dalam posisi yang berbeda didalam masyarakat. Laki-laki dianggap lebih dari perempuan, dimana perempuan harus melahirkan anak laki-laki, harus mengikuti kata suami, harus tunduk pada ketentuan adat tanpa protes dan cukup

dengan menyesuaikan diri mereka saja, tidak berhak atas harta orang tua mereka, bila terjadi perceraian maka tidak berhak atas hak asuh anak sebagaimana ia tidak memiliki garis kekeluargaan, berperan ganda sebagai ibu dan pencari nafkah. Sedangkan laki-laki berada pada posisi sebaliknya. Laki-laki dan perempuan terkungkung dalam aturan-aturan adat yang bisa dikatakan lebih menguntungkan bagi laki-laki dan menempatkan perempuan pada keadaan termarginalkan, tersubordinat, distreotip lemah, mengalami kekerasan, serta berperan ganda.

2. Subordinasi terhadap perempuan atau dalam hal ini budaya patriarki tetap dilanggengkan karena hal ini sudah dilakukan secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Apabila hal ini di ubah maka sama arinya dengan mengubah tatanan. Hal inilah dianggap tidak seseuai dengan ajaran agama Hindu dan saat ini pihak-pihak keagamaan mencoba untuk memperbaikinya.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka penulis kemudian memberikan saran terhadap masyarakat Bali dan masyarakat pada umumnya untuk kembali memandang pentingnya memahami persoalan patriarki, sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Bali agar dapat memandang bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perspektif agama yang dianut yakni Hindu dan kembali kepada kitab suci Wedah bahwa perempuan dan laki-laki memang berada pada ikatan patriarki akan tetapi adat yang dijalankan dan dipertahankan sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran agama dan menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang diuntungkan.
2. Bagi masyarakat umum, agar tidak memandang perempuan sebelah mata. Dalam artian bahwa dengan memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan maka keduanya dapat memberikan hasil yang sama. Perempuan dan laki-laki saling membutuhkan dalam

fungsi mereka masing-masing tanpa ada sa vgylah satunya yang disubordinat, budaya patriarki bukanlah masalah yang besar selama kita melihatnya melalui kaca mata agama yang kita yakini karena agama tentu saja mengajarkan hal-hal baik mengenai bagaimana posisi perempuan dan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Barry, Yacub Dahlan. 2001. *Kamus Sosiologi Antropologi*. Surabaya : Indah
- Basrowi, M.S. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Penerbit Ghalia Indonesia : Bogor
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Illich, Ivan. 2007. *Matinya Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Koenjaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- Koenjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Mosse, Julia C. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mustadjar, Musdaliah. 2013. *Sosiologi Gender Dalam Keluarga Bugis*. Makassar: Rayhan Intermedia
- Ollenburger, J.C & Helen A. Moore. 2002. *Sosiologi Wanita*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya
- Pinem, Saroha. 2000. *Kesehatan Reproduksi & Kontrasepsi*. Jakarta : Trans Media
- Ritzer, G & Goodman, D.J. 2004. *Teori sosiologi Modern*. Jakarta : Prenada Media
- Sastriyani. 2007. *Glosarium, Seks dan Gender*. Yogyakarta : Carasuati Books
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Turner, Bryan. 2008. *Teori-Teori Sosiologi Modernitas Postmodernitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Widianti, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Gender*. Jakarta : Kompas
- Internet :**
- <http://studibudaya.wordpress.com/2011/02/01/sisi-gelap-kekerasan-ideologi-patriaki-pada-perempuan-bali/> diakses pada 12 Februari 2014
- <http://candrawesly.blogspot.com/2012/06/unsur-unsur-sistem-sosial-dan.html>
- http://claustrophobia.blogspot.com/p/blog-page_4.html diakses pada 12 Februari 2014
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme> diakses pada 12 Februari 2014